

**(KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK) PENINGKATAN CITRAWALIKOTA  
MAKASSAR MELALUI PROGRAM MAKASSAR TDAK RANTASA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik  
Pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
UIN Alauddin Makassar*

Oleh :

**ST.NURHAEDAH**

**NIM: 30600112007**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT, DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.karena dengan hidayah serta ijinnyalah, sehingga skripsi yang berjudul “(KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK) PENINGKATAN CITRA WALIKOTA MAKASSAR MELALUI PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA” dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw, atas jasa dan pengabdianya yang tulus dalam menyampaikan risalah kebenaran Islam kepada umat manusia.

Sebelumnya Ucapan banyak terima kasih kepada orangtua penulis dengan bangga kepada Ayahanda Alm.Drs.H.Hazairin yang selalu jadi panutan serta memberikan pesan serta motivasi dan tidak pernah lelah berusaha demi memenuhi keinginan penulis dan Ibunda Hj.St.Hadawiah yang selalu jadi pendengar tiap keluh kesah dan membimbing serta menjaga dengan sabar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini, tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis berkewajiban menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari., M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin dan Wakil Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Bapak Prof.Dr.H. Muh. Natsir. M.Ag.selaku Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat,Dan Politik UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, S.Sos., M.Si, sebagai ketua Jurusan Ilmu Politik dan Bapak Syahrir Karim, M.Si, Ph.D. sebagai sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar.
4. Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si sebagai pendamping Akademik yang telah memberikan arahan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Anggriani Alamsyah, S.IP, M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Syamsul Asri S.IP, M.Fil sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar yang tidak disebutkan penulis satu persatu, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
7. Seluruh staf pegawai akademik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Saudara-Saudaraku serta Kakak Ipar beserta keluarga yang selalu membantu penulis baik itu secara akademik maupun secara materi.
9. Rekan-rekan mahasiswa, terutama para mahasiswa jurusan Ilmu Politik angkatan 2012. khususnya JJM yaitu Sri Sumarni, Eko Rachmat, Syahril Ali, M. Asnawi, Muh. Ibnu Rusyd, Khaidir Alif dan Irfan M yang

senantiasa memberi saran serta mendengarkan segala curhatan dan memberikan motivasi kepada penulis.

10. Teman seperjuangan Nurfahirah, Nurulfadlyah, Sri Maulinda, Jumriani dan gadis ipol 2012 yang saling memberikan dukungan serta membantu dalam setiap kekurangan dalam menyelesaikan skripsi.

11. Sahabat-sahabat yang senantiasa memberi dukungan Ezra Imanuela, Suci Indrawati Aswad, Nabila Sanjaya, Dewi Oktaviani, Rizky Novianti, Aprilia Selviaty dan kak Iin Nurindah Sahib yang telah bersedia menemani dan banyak menghibur serta memberikan semangat kepada penulis.

12. Kawan-kawan KKNP Angkatan VI Kecamatan Binamu yang sampai sekarang masih tetap solid dan memberikan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan, penulis hanya mampu mengembalikan kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal. Amin.

Samata, 6 September 2016

Penyusun

**ST.NURHAEDAH**

**NIM.30600112007**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian.....	15
1. Waktu dan lokasi penelitian .....	15
2. Jenis Penelitian .....	16
3. Teknik Pengumpulan Data .....	17
4. Teknik Analisis Data .....	18
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR .....	19
1. Profil Kota Makassar .....	19
2. Visi-Misi Makassar .....	20
3. Program Makassar Tidak Rantasa .....	21

4. Struktur Organisasi Bagian Humas	
Sekretariat Daerah Kota Makassar.....	22
5. Tugas dan Fungsi Bagian Humas .....	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	29
A. Bentuk Pencitraan Politik Danny Pomanto Melalui Program Makassar Tidak <i>Rantasa</i> Oleh Humas Pemerintah Kota Makassar	29
B. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencitraan Danny Pomanto Melalui Program Makassar Tidak <i>Rantasa</i> .....	55
BAB IV PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Implikasi Penelitian .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN	



## ABSTRAK

**Nama : St.Nurhaedah**

**Nim : 30600112007**

**Jurusan : Ilmu Politik**

**Judul : *(Kajian Komunikasi Politik) Peningkatan Citra Walikota Makassar Melalui Program Makassar Tidak Rantasa***

---

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Peningkatan Citra Walikota Makassar Melalui Program Makassar Tidak *Rantasa*. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk pencitraan Dany Pomanto melalui Program MTR oleh Humas Pemerintah kota Makassar dan tanggapan masyarakat terhadap pencitraan Danny Pomanto melalui Program Makassar Tidak Rantasa.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi politik dan *public relations*. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara langsung terhadap objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pencitraan Dany Pomanto melalui Program Makassar Tidak Rantasa oleh Humas Pemerintah kota Makassar adalah ditinjau melalui unsur-unsur komunikasi politik yang dimana humas bertindak sebagai komunikator dan masyarakat sebagai penerima. Untuk menyampaikan pesan yang mudah diterima oleh masyarakat melalui berbagai saluran baik itu media cetak media visual dan media social untuk berusaha menaikkan citra walikota Makassar. Walikota berserta jajarannya khususnya humas telah menunjukkan kinerjanya sehingga kenyatannya kota makassar dua kali memperoleh piala adipura secara otomatis menaikkan citra positif walikota Makassar itu semua berkat kerjasama dari pihak pemerintahan dan masyarakat yang dijembatani oleh humas sehingga Program MTR berjalan seperti semestinya. Walaupun masyarakat menilai sosialisasi Program MTR masih kurang, tetapi semua itu kita kembalikan kepada pemerintah dan masyarakatnya.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 6 September 2016

Penyusun,

**ST. NURHAEDAH**  
NIM. 30600112007





## ABSTRAK

**Nama : St.Nurhaedah**

**Nim : 30600112007**

**Jurusan : Ilmu Politik**

**Judul : (Kajian Komunikasi Politik) Peningkatan Citra Walikota Makassar Melalui Program Makassar Tidak Rantasa**

---

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai Peningkatan Citra Walikota Makassar Melalui Program Makassar Tidak *Rantasa*. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja bentuk pencitraan Dany Pomanto melalui Program Makassar Tidak *Rantasa* oleh Humas Pemerintah kota Makassar dan tanggapan masyarakat terhadap pencitraan Danny Pomanto melalui Program Makassar Tidak *Rantasa*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi politik dan *public relations*. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Cara pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara langsung terhadap objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pencitraan Dany Pomanto melalui Program Makassar Tidak *Rantasa* oleh Humas Pemerintah kota Makassar adalah ditinjau melalui unsur-unsur komunikasi politik yang dimana humas bertindak sebagai komunikator dan masyarakat sebagai penerima. Untuk menyampaikan pesan yang mudah diterima oleh masyarakat melalui berbagai saluran baik itu media cetak media visual dan media social untuk berusaha menaikkan citra walikota Makassar. Karena Walikota berserta jajarannya khususnya humas telah menunjukkan kinerjanya sehingga kenyatannya kota makassar dua kali memperoleh piala adipura secara otomatis menaikkan citra positif walikota Makassar itu semua berkat kerjasama dari pihak pemerintahan dan masyarakat yang dijembatani oleh humas sehingga Program MTR berjalan seperti semestinya. Walaupun masyarakat menilai sosialisasi Program MTR masih kurang. Tetapi semua itu tergantung kepada pemerintah dan masyarakat dalam menyukseskan program MTR.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Public relations* hadir untuk memberi penerangan informasi kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan pemerintah dan servis apa saja yang dapat di berikan olehnya dan menanam kepercayaan di dalam hati sanubari rakyat akan kecakapan, kejujuran, dan pengabdian aparatur dinas pemerintahan yang bersangkutan.<sup>1</sup> Pada *public relations* dinas pemerintah, tentunya melekat pada dirinya, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab terlaksananya cita-cita Negara dan program pemerintah (Makassar' Tidak *Rantasa*).

Sebagaimana diketahui *Public Reporting* adalah salah satu cara terpenting yang didalamnya meliputi usaha dan kegiatan memberikan informasi kepada masyarakat tentang program pemerintah dan pelaksanaannya. *Public reporting* dalam masyarakat yang demokratis adalah mutlak penting mengingat jarak yang panjang antara birokrasi dengan masyarakat, ditambah lagi dengan semakin meluasnya usaha-usaha pemerintah. Dalam masa kemajuan teknologi sekarang ini, kemungkinan sarana komunikasi yang menyampaikan *public reporting* ini adalah luas sekali. Media massa dari mulai tercetak hingga audio visual dapat dipergunakan. Apa yang telah diuraikan diatas adalah segi eksternal dari PR yaitu *Public Relations* dinas pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat.

Selanjutnya segi internal dari dinas pemerintah, dimana *Internal Public* dijadikan sasaran *public relations*. Internal meliputi usaha-usaha untuk memberi

---

<sup>1</sup> Bambang Siswanto, *HUMAS (Hubungan Masyarakat teori dan praktek)*, (Jakarta: bumi aksara. 1992), Hlm.51

pengertian kepada karyawan sendiri di dalam dinas pemerintah yang bersangkutan, agar supaya disadari betul-betul fungsi dinas/pemerintah sesungguhnya memerlukan *social-support*, *social participation*, *social control* dan *social responsibility*. Menginsyafi bahwa eksistensi adalah terutama berdasarkan loyalitas dari rakyatnya. *Public Relations* perlu juga memberikan pengertian kepada karyawan instansi sendiri, bahwa kelancaran pekerjaan hanya dapat dicapai dengan mobilitas *intern*. Di dalam dinas pemerintah itu perlu diciptakan iklim *human relations* yang sehat yaitu saling menghargai tugas masing-masing, disiplin team work dsb<sup>2</sup>. Manfaat *public relations* yaitu publisitas (*publicity*), publikasi (*publication*), periklanan (*advertising*), promosi (*promotion*), hubungan dengan pers (*pers relations*) dan sebagainya, didalam lingkup fungsi dan tugas kehumasan yang dikenal hingga kini dan merupakan profesi yang cukup dihormati dan dapat di andalkan.<sup>3</sup>

Demikianlah, hal ini menunjukkan bahwa seorang petugas humas, bukan saja dapat bertindak sebagai sebuah “Radar” akan tetapi juga diharapkan sebagai pelicin jalan untuk memungkinkan dapat dilaksanakannya *public policy* (Makassar Tidak *Rantasa*). Sehubungan dengan tugas dan kewajiban petugas humas ialah bagaimana dapat menjalin hubungan-hubungan yang baik dan harmonis antara instansinya dengan masyarakat. Baik masyarakat ramai (*general public*) maupun masyarakat-masyarakat tertentu (*special public*). Perlu diingat, bahwa petugas humas hanya sebagai penghubung, yang harus diutamakan dalam

---

<sup>2</sup>Bambang Siswanto, *HUMAS (Hubungan Masyarakat teori dan praktek)*, (Jakarta: bumi aksara. 1992), Hlm. 52-53

<sup>3</sup>Rosady Ruslan, *Kampanye Public Relations*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1997), Hlm. 7

*Public Relations* adalah kepentingan instansi dan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian jelaslah, bahwa sifat merendahkan diri akan lebih menjamin tercapainya hasil-hasil yang diharapkan. Dengan menunjukkan kenyataan-kenyataan bahwa kepentingan instansinya dan masyarakat yang lebih diutamakan, maka kemungkinan baginya untuk berpersuasi adalah lebih besar. Sifat lainnya yang perlu dimiliki setiap petugas humas, adalah sifat keterbukaan. Sifat keterbukaan ini merupakan penolong besar, untuk kemungkinan berhasilnya suatu persuasi.

Disini Public relations berupaya membentuk citra positif terhadap suatu lembaga/organisasi (Walikota Makassar) dimata publiknya, dengan menyangkut unsur-unsur:

1. Citra baik (*good image*)
2. Itikad yang baik (*good will*)
3. Saling pengertian (*mutual understanding*)
4. Saling mempercayai (*mutual confidence*)
5. Saling menghargai (*mutual appreciations*)
6. Toleransi (*tolerance*)<sup>4</sup>

Sebagaimana dijelaskan pula dalam Al-qur'an Ayat tentang Menyebarkan informasi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا  
بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي الْقَوْمَ  
الْكَافِرِينَ

---

<sup>4</sup> Elvinaro Ardianto, *Dasar-Dasar Public relations*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2006), Hlm. 8

Terjemahnya:

*“Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir” (QS. Al-maidah /5 : 67)<sup>5</sup>*

Walikota Makassar “Ir.H. Mohammad Ramdhan Pomanto” yang dilantik pada tanggal 8 Mei 2014 lalu. Tidak lama setelah dilantik Mohammad Ramdhan Pomanto mengumpulkan pimpinan 63 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar di Ruang Pola Kantor Balaikota Makassar. Pasangan Syamsu Rizal ini dalam rangka rapat kordinasi program Gerakan Makassar Tidak *Rantasa* (Kota Makassar tidak kotor) atau disingkat Gemar MTR. Danny Pomanto sapaan Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, program Gemar MTR harus dimulai dari lingkungan pegawai Pemkot Makassar dan unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Kota Makassar. Untuk mengatasi masalah kebersihan Kota Makassar maka Pemerintah Kota. Kebijakan ini mulai diperkenalkan didepan warga Kota Makassar pada tanggal 15 Juni 2014. Kebijakan Makassar Tidak *Rantasa* merupakan kebijakan yang mengatur tentang tata kebersihan Kota dimulai dari kesadaran semua warga Kota Makassar untuk mengedepankan aspek kebersihan dalam kehidupan sehari-hari<sup>6</sup>

Pencitraan Danny Pomanto dibangun melalui strategi *Public Relations* politik. Strategi ini dipilih sebagai strategi untuk pencitraan. strategi ini memiliki keunggulan dari *political advertising*. Biaya relatif lebih rendah karena tidak perlu

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Surah Al-Maidah Ayat 67. Jakarta : Maghfirah Pustaka. 2006.Hlm. 119

<sup>6</sup> <http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/24/gerakan-makassar-tak-rantasa-mulai-mulai-15-juni-2014>, di akses pada hari sabtu, 27 februari 2016

membeli *space* di media. Selain itu, keterampilan penyampaian pesan dikembangkan melalui simulasi lingkungan sosial. Dari keunggulan pasti memiliki juga sisi kelemahan, yaitu proses penciptaan kredibilitas membutuhkan waktu lebih karena pesan harus dibangun berdasarkan keyakinan dan jangkauan tidak dapat langsung bersamaan. Dalam hal ini yang ideal tentu saja mengkombinasikan kedua strategi sehingga akan lebih efisien.<sup>7</sup>

Berdasarkan apa yang telah diutarakan diatas maka sangat termotivasi bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian yang tidak jauh berbeda dengan tema uraian diatas dengan judul “KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK PENINGKATAN CITRA WALIKOTA MAKASSAR MELALUI PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA”

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas maka dibuatlah sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pencitraan Dany Pomanto melalui Program Makassar Tidak *Rantasa* oleh Humas Pemerintah kota Makassar?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencitraan Danny Pomanto melalui Program Makassar Tidak *Rantasa*?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk pencitraan Dany Pomanto melalui Program Makassar Tidak *Rantasa* oleh Humas Pemerintah kota Makassar

---

<sup>7</sup> Dian Natalia, “*Strategi Public Relations dalam Pencitraan Bupati*”. e-journal UAJY. 1 januari 2012. <http://e-journal.uajy.ac.id/1210/2/1KOM03535.pdf> di akses pada hari sabtu, 27 februari 2016



2. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap pencitraan Danny Pomanto melalui Program Makassar Tidak *Rantasa*

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Kegunaan penelitian ini secara teoritis yakni sangat diharapkan mendapatkan sebuah hasil yang berguna sebagai alat informasi yang mempermudah untuk mendapatkan sebuah pengetahuan tentang peningkatan citra walikota makassar melalui program Makassar Tidak *Rantasa*.

##### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan agar berguna sebagai alat untuk menguraikan serta menjadi pokok penyelesaian dari sebuah permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan mengenai peningkatan citra walikota makassar melalui program Makassar Tidak *Rantasa* apakah sudah berjalan secara optimal di masyarakat dan memberikan citra yang baik bagi Walikota Makassar. Sehingga dapat berguna untuk memberikan sebuah agent informasi bagi kalangan yang akan melakukan penelitian berikutnya. Bagi staf humas pemkot dan Walikota Makassar Danny Pomanto agar mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kinerja para humas serta menjadi bahan acuan untuk menjalankan Program MTR.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengamatan penulis, diterjemahkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema. Adapun yang membedakan penelitian penulis dan

penelitian sebelumnya adalah objek pembahasan di lokasi peneliti yang berbeda terkait beberapa penelitian yang terkait dengan *public relations*.

Sebagaimana penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Elisabeth Maria yang berjudul *Strategi Peran Praktisi Public Relations Dalam Partai Politik*. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi dan peran praktisi *Public Relations* Partai Nasional Demokrat sebagai partai politik baru dalam pelaksanaan komunikasi dan persuasi politik menuju pemilu 2014. Peneliti mengidentifikasi bahwa semakin banyak strategi praktisi *Public Relations* dalam komunikasi dan persuasi politik, semakin besar pula peran praktisi *Public Relations* dalam komunikasi dan persuasi politik Partai Nasional Demokrat menuju Pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan/literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktisi *public relations* menjalankan strategi dan perannya dalam pelaksanaan komunikasi dan persuasi politik Partai Nasional Demokrat menuju Pemilu 2014 dengan baik.<sup>8</sup>

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Muhammad Yaser Arafat yang berjudul *Peranan Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Brebes (Studi Pada Bagian Humas Dan Protokol SETDA Kabupaten Brebes)*. Hasil Berdasarkan penelitian ini Pemerintah Daerah Humas Brebes telah melaksanakan peran sebagai Brebes ahli penasihat manajemen pemerintah, yang memberikan masukan dan solusi untuk

---

<sup>8</sup> Elisabeth Maria R, *Strategi Peran Praktisi Public Relations Dalam Partai Politik Baru*, (universitas Indonesia, Jakarta 2014, sebuah *skripsi*).



Brebes pemerintah dalam melaksanakan komunikasi dua arah kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai fasilitator dari pemecahan masalah adalah PR menerima semua keluhan dan masalah yang harus diatasi atau menyampaikan masalah yang telah ditampung ke pihak berwenang atau disampaikan kepada pimpinan. Peran Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai teknisi komunikasi adalah bagian dari PR pemerintah Brebes hubungan yang harmonis baik dengan karyawan humas itu sendiri dan dengan luar. Hambatan atau kendala adalah kompetensi pada sumber daya manusia, posisi pemerintah di Brebes, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi yang terjadi antara PR.<sup>9</sup>

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Monika Wutun yang berjudul *Analisis Berita Politik Tentang Gubernur Nusa Tenggara Timur di Media Massa Cetak (Studi Analisis Wacana Model Teun A. Van Dijk Pada Headline Pemberitaan Di Surat Kabar Harian Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express Dalam Perspektif Public Relations Politik Periode Agustus – September 2012)*. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan tampilan citra Gubernur Nusa Tenggara Timur, Frans Lebu Raya dalam berita politik di Surat Kabar Harian Pos Kupang dan Harian Pagi Timor Express dalam perspektif Public Relations politik. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Wacana Model Teun A. Van Dijk dengan paradigma kualitatif – konstruktivisme. Model Wacana Van Dijk mengamanatkan. Karena itu peneliti menyarankan agar media massa di NTT, khususnya Pos Kupang dan Timor Express agar lebih kritis

---

<sup>9</sup> Muhammad Yaser Arafat, Peranan Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Brebes (Studi Pada Bagian Humas Dan Protokol SETDA Kabupaten Brebes)", (universitas pancasakti Tegal 2013, sebuah *skripsi*).

dan membekali wartawan dengan kompetensi yang memadai dalam pemberitaan terkait citra. Karena apa yang diberitakan akan menjadi rujukan bagi masyarakat NTT dalam menentukan pilihan untuk partisipasi politik.<sup>10</sup>

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Abdullah yang berjudul *Membangun Citra Partai Politik Masa Depan (Studi Deskriptif Strategi Humas Partai Persatuan Pembangunan Sleman DIY dalam Membangun Citra)*. Penelitian ini membahas bagaimana cara Untuk berkomunikasi citra Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan Sleman Yogyakarta menerapkan *public relations* atau kegiatan *public relations*. Berdasarkan latar belakang penulis membatasi masalahnya adalah, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, respon masyarakat terhadap citra kesatuan partai diterapkan dalam pembangunan *public relations*. program analisis, dan metode yang mampu menganalisis hal-hal mikro yang berkaitan strategi dan taktik komunikasi pencitraan. Diketahui bahwa Partai Persatuan Pembangunan memiliki strategi untuk membangun citra masa depan Sleman partai melalui: mendukung utama kegiatan manajemen, membina hubungan yang harmonis antara ppp dengan masyarakat, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan, keinginan untuk melayani masyarakat dan menciptakan komunikasi dua arah.<sup>11</sup>

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Elta Mala Sari yang berjudul *Press Release dan Citra Pemerintah (Studi Korelasional Pengaruh Press Release Bagian Hubungan Masyarakat (Humasy) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan*

---

<sup>10</sup> Monika Wutun, Analisis Berita Politik Tentang Gubernur Nusa Tenggara Timur di Media Massa Cetak, (universitas Padjadjaran, Bandung 2013, sebuah *skripsi*.Hlm. 4

<sup>11</sup> Abdullah, *Membangun Citra Partai Politik Masa Depan (Studi Deskriptif Strategi Humas Partai Persatuan Pembangunan Sleman DIY dalam Membangun Citra)*, (universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015, sebuah *skripsi*).

*Terhadap Citra Pemerintah Kota Medan di Masyarakat Kota Medan*) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana hubungan antara press release Bagian Humasy Setda Kota Medan dengan citra pemerintah Kota Medan. Dari hasil penelitian ini diperoleh rs sebesar 0,681. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup berarti antara press release bagian Humasy Setda Kota Medan dengan citra pemerintah Kota Medan. Kemudian untuk mengetahui besar kekuatan pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y digunakan uji determinan korelasi. Dan ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh press release Bagian Humas Setda Kota Medan dengan kekuatan 46% dalam mempengaruhi citra Pemerintah Kota Medan, dan 54% dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengalaman langsung, dan lainnya.<sup>12</sup>

Adapula perbedaan antara skripsi penulis dengan tulisan-tulisan sebelumnya adalah dari segi teori. Dalam hal ini penulis menggunakan teori komunikasi politik dalam menganalisis hasil penelitian terkait dengan peningkatan citra walikota makassar melalui program makassar tidak rantasa oleh humas pemerintah kota Makassar.

#### **F. Kerangka teori**

Dalam menganalisis bentuk pencitraan Dany Pomanto melalui Program Makassar Tidak Rantasa oleh Humas Pemerintah kota Makassar dan tanggapan masyarakat terhadap pencitraan Danny Pomanto melalui Program Makassar Tidak Rantasa. Maka penulis menggunakan teori:

---

<sup>12</sup> Elta Mala Sari, Press Release dan Citra Pemerintah (Studi Korelasional Pengaruh Press Release Bagian Hubungan Masyarakat (Humasy) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Medan Terhadap Citra Pemerintah Kota Medan di Masyarakat Kota Medan), (universitas Sumatera utara, medan 2014, sebuah skripsi). Hlm.5

## 1. Komunikasi Politik

Teori dapat diartikan sebagai sejumlah gagasan yang status dan asalnya bervariasi dan dapat dipakai untuk menjelaskan atau menafsirkan fenomena. Sehubungan penjelasan ini, berdasarkan paradigma komunikasi politik yang telah dipaparkan, dapat diturunkan beberapa teori dasar dan beberapa model dasar yang telah lama dikenal. Teori-teori tersebut juga telah lama di aplikasikan dalam kegiatan komunikasi politik. Pada dasarnya teori-teori tersebut berbeda satu dengan yang lainnya karena memang bersumber dari perspektif atau paradigma komunikasi yang berbeda.

Komunikasi politik merupakan salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Seperti dikemukakan Almond :

*all of the functions performed in political system, political socialization dan recruitment, interest articulation, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of communication.* Berarti, semua fungsi (tujuh fungsi) yang dilakukan dalam sistem politik yaitu: Sosialisasi politik, Perekrutan, Artikulasi interest (artikulasi kepentingan), Agregasi interest (agregasi kepentingan), Pembuatan aturan, Aplikasi aturan, dan Aturan putusan hakim, harus dilakukan melalui komunikasi.<sup>13</sup>

Tulisan Almond menunjukkan bahwa ada kaitan antara fungsi politik dengan komunikasi. Fungsi komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi

---

<sup>13</sup> HafiedCangara, *Komunikasi politik*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2009) Hlm.21

pada saat tujuh fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi lainnya itu dijalankan. Hal itu berarti bahwa komunikasi politik terdapat secara *inherent* di dalam setiap fungsi system politik. Pendapat para ilmuwan politik (dalam hal ini adalah ilmuwan politik beha-vioralis) agak berbeda dengan pandangan ilmuwan komunikasi dalam komunikasi dalam melihat komunikasi politik. Apabila ilmuwan komunikasi lebih banyak membahas perencanaan media massa dalam komunikasi politik (dengan sedikit perhatian pada komunikasi antarpribadi), para ilmuwan politik mengartikan komunikasi politik sebagai proses komunikasi yang melibatkan pesan politik dan aktor politik dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Ilmuwan komunikasi menilai saluran komunikasi dalam bentuk media massa dan saluran tatap muka memainkan peranan yang sama pentingnya.

Telah dijelaskan, fungsi komunikasi politik dapat ditemukan didalam fungsi-fungsi lainnya. Walaupun komunikasi politik mempunyai ciri-ciri seperti itu, tidaklah berarti bahwa komunikasi politik kecil peranannya justru sebaliknya. Alasannya, komunikasi politik merupakan proses yang menentukan keberhasilan fungsi-fungsi lainnya, sedangkan keberhasilan penyampaian pesan dalam setiap fungsi itu menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi bersangkutan.<sup>14</sup>

Artikulasi kepentingan (fungsi keempat dari sistem politik) umpamanya, sangat tergantung pada komunikasi politik. Tanpa adanya komunikasi politik, artikulasi kepentingan adalah benda mati, karena artikulasi itu sendiri tidak ada. Menurut Almond, artikulasi kepentingan dijalankan oleh organisasi politik dalam

---

<sup>14</sup> HafiedCangara, *Komunikasi politik*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2009) Hlm.22

bentuk penyampaian kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat kepada penguasa politik (pemerintah). Proses komunikasinya terletak pada “penyampain”. Keberhasilan penyampaian pesan (dalam bentuk kepentingan warga masyarakat) memainkan peranan yang amat penting dalam penentuan keberhasilan pelaksanaan fungsi artikulasi kepentingan<sup>15</sup>.

Dalam menganalisis bentuk pencitraan Danny Pomanto melalui Program Makassar Tidak *Rantasa* oleh Humas Pemerintah kota Makassar, penulis akan menggunakan Komponen-komponen Komunikasi politik Menurut Dan Nimmo, 1993:13 yaitu:<sup>16</sup>

1. Komunikator
2. Komunikan
3. Pesan (message)
4. Saluran (channel)
5. Tanggapan (effect)

## 2. *Public Relations*

Humas atau *Public Relations* akan sangat dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dimana *Public Relations* itu dipraktekkan.

Edward L. Berneys dalam buku *Public Relations* menyatakan PR memiliki 3 arti:

- a. Memberi informasi kepada masyarakat
- b. Persuasi yang dimaksudkan untuk mengubah sikap dan tinggah laku masyarakat terhadap lembaga demi kepentingan kedua belah pihak. Usaha

<sup>15</sup> HafiedCangara, *Komunikasi politik*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2009) Hlm.23-24

<sup>16</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Politik: Khyalayak dan efek*, ( Jakarta :Ramaja Rosadakarya.2006), Hlm. 16



untuk mengintergrasikan sikap dan perbuatan antara lembaga dengan sikap perbuatan masyarakat dan sebaliknya.<sup>17</sup>

*Public relations* (PR) merupakan sebuah profesi yang biasanya digunakan oleh banyak organisasi. Saat ini PR juga banyak digunakan dalam ranah politik untuk membantu para aktor-aktor politik. Ranah politik menggunakan kinerja seorang PR dalam rangka membangun citra positif di benak masyarakat untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Biasanya kepentingan tersebut untuk mencari dukungan dari masyarakat.<sup>18</sup>

Aristoteles pernah menyimpulkan bahwa '*man is by nature a political animal*'. Dengan demikian, manusia sejatinya tidak akan pernah bisa lepas dari aktivitas berpolitik. Jika dalam praktik *public relations* perusahaan yang menjadi komponennya, antar lain *shareholder*, *customer*, dan pekerja untuk mengefektifkan peluang yang ada, meneguhkan yang sedang berjalan dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Begitu pula dalam PR politik, produknya adalah aktivitas yang terhubung dengan politik yang tujuannya adalah pencapaian tujuan politik seseorang, sekelompok orang atau sebuah institusi politik. PR Politik sebagai penggunaan saluran-saluran media untuk mengkomunikasikan interpretasi isu-isu politik yang khusus dalam upaya pengumpulan dukungan politik.<sup>19</sup>

Fungsi-fungsi Humas yang tercantum dalam *booklet PRSA (Public Relations Society of America)* dengan judul *Careers in Public Relations* dapat

---

<sup>17</sup> Amie Primarni, *Introduction to Public Relations*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia. 2011), Hlm.26-28

<sup>18</sup> Dian Natalia, Strategi Public Relations dalam Pencitraan Bupati. Jakarta: (e-journal UAJY. 2012, sebuah skripsi). Hlm.5

<sup>19</sup> Giles G. Lesmana, *Kompil PR Politik*. Scribd. Sebuah Jurnal.hlm. 16

memberikan gambaran yang lebih khusus. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: *Programming, Relationship, Writing and Editing, Information, Production, Special event, Speaking, Research and Evolution*<sup>20</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Waktu dan lokasi penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2016, waktu pelaksanaannya kurang lebih dua bulan dan tempat lokasi penelitian berada di Kota Makassar.

### **2. Jenis penelitian**

Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoretis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni.<sup>21</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian.

#### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data selama penelitian yang merupakan elemen penting pada proses penelitian.

Wawancara dapat diartikan sebagai cara mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face*

---

<sup>20</sup> Amie Primarni, *Introduction to Public Relations*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia. 2011. hlm 16-18

<sup>21</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Diskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi(GP Press Group), 2013), Hlm.29-30.



*to face*).<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara mendalam (*in-depth*) dengan melakukan wawancara dengan informan kunci yaitu orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang komunitasnya yang dapat memberikan data berharga.<sup>23</sup> maka informan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2. Staf Humas Pemkot
3. Masyarakat Kota Makassar (Penikmat warkop)
4. Sosial Media

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti.

c. Studi Pustaka

Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar,

---

<sup>22</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi ketiga, ( Jakarta: Kharisma Putra Utama 2005), hlm.69

<sup>23</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi ketiga, ( Jakarta: Kharisma Putra Utama 2005), hlm.189

serta data-data mengenai. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan suatu kajian tentang sesuatu dengan meneliti bagian-bagiannya serta hubungan dari bagian-bagian itu. Proses ini berlangsung bertahap yakni pengkajian literatur atau pengamatan pada fenomena, kategorisasi, menelusuri kategorisasi, menjelaskan hubungan kategorisasi, menarik kesimpulan, serta membangun teori.<sup>25</sup>

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data di kelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.
2. Reduksi data yang merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari

---

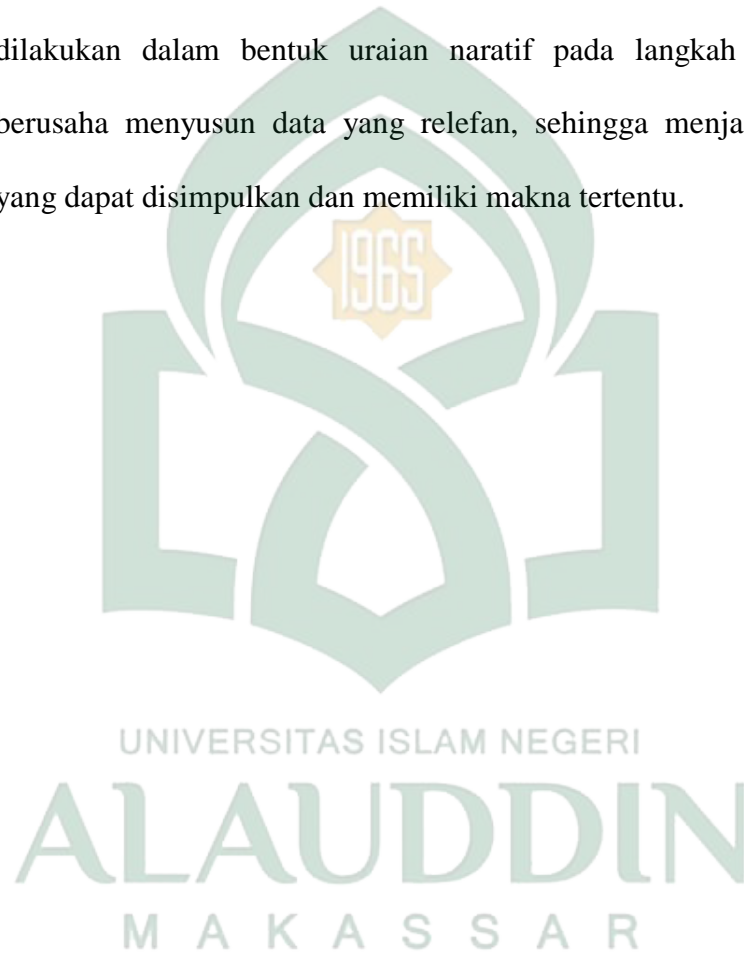
<sup>24</sup> Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosada karya, 2010) hlm.115

<sup>25</sup> Burhan Bangin, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, Hlm.192

<sup>26</sup> Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Bandung: Tarsito, 1990, Hlm.162

catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data setelah data reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KOTA MAKASSAR

#### 1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar sebagai salah satu daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan, secara yuridis formil didasarkan pada Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Selanjutnya Kota Makassar menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965, (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 94), dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar diubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar.<sup>27</sup>

Kota Makassar yang pada tanggal 31 Agustus 1971 berubah nama menjadi Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km<sup>2</sup> menjadi 175,77 km<sup>2</sup> dengan mengadopsi sebagian wilayah kabupaten tetangga yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada perkembangan selanjutnya nama Kota Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun

---

<sup>27</sup> Profil Kabupaten/kota, Kota Makassar Sulawesi Selatan, hlm. 1

1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, hal ini atas keinginan masyarakat yang didukung DPRD Tk.II Ujung Pandang saat itu, serta masukan dari kalangan budayawan, seniman, sejarawan, pemerhati hukum dan pelaku bisnis. Hingga saat ini Kota Makassar memasuki usia 406 tahun sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar yaitu tanggal 9 Nopember 1597.

## **2. Visi-Misi Kota Makasar**

Tiga misi utama walikota Danny Pomanto untuk warga Kota Makassar, yakni merekonstruksi kehidupan rakyat untuk menjadi masyarakat sejahtera standar dunia, merestorasi tata ruang kota menjadi kota nyaman kelas dunia, serta mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik kelas bebas korupsi. Ketiga misi tersebut memiliki 8 titik konsentrasi 'Delapan Jalan Masa Depan'.

- Masyarakat Sejahterah Standar Dunia:

1. Menuju bebas pengangguran
2. Jaminan sosial keluarga serba guna untuk semua
3. Pelayanan kesehatan darurat gratis ke rumah 24 jam
4. Deposito pendidikan gratis semua bisa sekolah
5. Sampah kita DIA tukar beras
6. Training keterampilan gratis dan dana bergulir tanpa agunan
7. Rumah kota murah untuk rakyat kecil
8. Hidup hijau dengan kebun kota

- Kota Nyaman Kelas Dunia :

1. Atasi macet, banjir, sampah, dan masalah perkotaan lainnya

2. Bentuk badan pengendali pembangunan kota
3. Bangun waterfront city selamatkan pesisir dan pulau-pulau Makassar
4. Bangun sistem transportasi publik kelas dunia
5. Lengkapi infrastruktur kota berkelas dunia
6. Bangun birringkanal city dan delapan ikon kota baru lainnya
7. Bangun taman tematik
8. Tata total lorong

- Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas Korupsi:

1. Menuju PAD Rp 1 triliun
2. Insentif progresif semua aparat RT dan RW Rp 1 juta per bulan
3. Kuota anggaran kelurahan Rp 2 miliar per kelurahan per tahun
4. Pelayanan publik langsung ke rumah
5. Fasilitas pelayanan publik terpusat terpadu di kecamatan
6. Pembayaran pajak dan retribusi tahunan online terpadu
7. Bebas bayar internet di ruang publik kota 'Makassar Cyber City'
8. Bentuk Makassar incorporate dan Bank of Makassar<sup>28</sup>

### 3. Program Makassar tidak *Rantasa'*

Makassar ta tidak *Rantasa'* disingkat MTR, Program ini mulai diperkenalkan di depan warga Kota Makassar pada tanggal 15 Juni 2014. menjadi salah satu program usungan Walikota Moh.Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal. Disadari, perang melawan kesemrawutan bukanlah pekerjaan ringan. Menciptakan bersih butuh amunisi besar dan melibatkan seluruh komponen

---

<sup>28</sup><http://news.liputan6.com/read/2130046/gerakan-revolusi-mental-dari-walikota-makassar>. Diakses 12:52 PM. Tanggal 10 juli 2016

masyarakat. Wajar saja Walikota Moh.Ramdhan Pomanto yang akrab disapa Danny, merasa perlu melakukan gerakan “revolusi” untuk melawan setiap bentuk perilaku yang tidak mendukung upaya penciptaan kebersihan kota. Sebab memang persoalan *rantasa* (kotor;jorok) bukan hanya pada persoalan kebersihan, tetapi juga ada pada pola pikir dan perilaku.

Tidak *rantasa*’ dalam bahasa Makassar berarti tidak kotor, tidak jorok. Secara sosiologis ‘*tidak rantasa*’ dimaknakan sebagai usaha untuk membangkitkan *siri’ na pace* orang Bugis Makassar yang akan selalu merasa malu kalau tidak menjaga kebersihan. Sampah berserakan adalah *rantasa*’. Akan tetapi lebih dari itu, pedagang kaki lima (PKL) yang tidak tertata parkir mobil semrawut, drainase tidak mengalir, pelacuran yang meraja lela, bahkan perilaku tak terpuji pun adalah *rantasa*’.

Inilah yang dijadikan ‘*strong*’ dalam usaha mendorong karakter dan tabiat bersih sehingga bias menjadi sebuah kebiasaan atau budaya. Makassar tidak Rantasa’, disingkat MTR, diharapkan menjadi gerakan social sekaligus gerakan moral. Sebab, mengubah cara pandang masyarakat tentang pentingnya kebersihan sama artinya dengan merekonstruksi kembali tatanan berfikir masyarakat. Tentu saja disadari kalau pekerjaan itu sangat berat namun bukan menjadi hal yang mustahil untuk di wujudkan.<sup>29</sup>

“MTR ini adalah gerakan rekontruksi moral yaitu dengan merekontruksi cara pandang masyarakat untuk hidup bersih terutama berkaitan dengan sampah,” tutur Danny di sela-sela sosialisasi MTR. Perlu dukungan masyarakat, karena itu

---

<sup>29</sup> Usman Nukma, 8 Jalan Masa Depan (Mainstream Baru Pembangunan Makassar), Makassar: Pelita Pustaka, 2014, hlm.166

pemerintah kota akan selalu mengajak masyarakat bekerjasama secara kolektif sehingga masalah sampah di Makassar dapat segera dituntaskan. Setiap masyarakat dihimbau untuk mengubah kebiasaan membuang sampah disembarang tempat dan sembarang waktu seperti yang kerap dilakukan selama ini. Program Gemar MTR (Gerakan Masyarakat Makassar Tidak *Rantasa*) mengandung makna pilosofi yang tinggi. Ketika berbicara masalah *rantasa*, maka hal itu juga menyangkut *siri*’ dan akhlak. Kata *rantasa* memang sengaja digunakan untuk menggali kultur yang ada di dalam dinamika kehidupan warga Makassar. “kita memunculkan *siri* ( malu) dan menggerakkan hati masyarakat Makassar, karena program ini hanya dapat terlaksana jika seluruh komponen turut berpartisipasi.”<sup>30</sup>

#### **4. Struktur Organisasi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Makassar**

Struktur organisasi bagian Humas Sekretariat Kota Makassar, berikut ini :




---

<sup>30</sup> Usman Nukma, 8 Jalan Masa Depan (Mainstream Baru Pembangunan Makassar), Makassar: Pelita Pustaka, 2014, hlm.167





*Sumber : Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Makassar*

## 5. Tugas dan Fungsi Bagian Hubungan Masyarakat

Peraturan Walikota Makassar Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah Kota Makassar Pasal 54 (Bagian Ketiga) yaitu dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat, untuk memperjelas kebijakan Pemerintah Kota;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan pengembangan hubungan masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program hubungan antar Pemerintah Daerah dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijakan dari kegiatan Pemerintah Kota;
- c. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan-bahan penerbitan;
- d. penyiapan bahan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers secara berkala;
- e. penyiapan bahan bimbingan pengumpulan informasi melalui media cetak/elektronik untuk memperoleh data/informasi yang benar;
- f. pengelolaan administrasi urusan tertentu.<sup>31</sup>

### **1. Kasub Pengaduan**

a. Pengolah pengaduan masyarakat.

1) Pengolahan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 187 huruf a mempunyai tugas menyusun kerangka dan mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat.

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :

- a) Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
- b) Melaksanakan penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.

---

<sup>31</sup> Peraturan Walikota Makassar Pasal 54 (Bagian Ketiga) Nomor 16 Tahun 2014

- c) Mengumpulkan data dan bahan terkait dengan pengaduan masyarakat melalui media cetak dan media elektronik.
  - d) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut jawaban atau rekomendasi yang akan disampaikan yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat.
  - e) Mengumpulkan bahan dan data terkait dengan jawaban.
  - f) Mempersiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan masyarakat.
  - g) Mendata dan mencatat setiap pengaduan yang masuk.
  - h) Mengolah dan menganalisis informasi/pengaduan.
  - i) Mengarsipkan setiap bahan dan data pengaduan sebagai alat kontrol.
  - j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
  - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Pengolah pelayan informasi publik dan dokumentasi.
- 1) Pengolah Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b mempunyai tugas memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan guna transparansi informasi.<sup>32</sup>

## **2. Kasub Dokumentasi**

- a. Pengolah Bahan Monitoring Perkembangan Masyarakat
- 1) Pengolah Bahan Monitoring Perkembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 180 huruf a mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan dan data perkembangan masyarakat Kota Makassar.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
- a) Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.

---

<sup>32</sup> Peraturan Walikota Makassar pasal 187 huruf a Nomor 16 Tahun 2014

- b) Membuat kliping dan guntingan artikel yang terdapat dalam berbagai media cetak yang berhubungan dengan berbagai permasalahan dan kebijakan Pemerintah Kota Makassar.
- c) Mengumpulkan, menyusun dan menginventarisir bahan dan data perkembangan masyarakat Kota Makassar.
- d) Mengolah data dan bahan yang diperoleh sehingga menjadi informasi yang relevan bagi pengambilan kebijakan.
- e) Membuat konsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- f) Membuat analisis secara berkala mengenai perkembangan masyarakat Kota Makassar.
- g) Melakukan monitoring secara terus menerus perkembangan masyarakat.
- h) Membuat laporan berkala hambatan dan kendala yang dihadapi dalam hal perkembangan masyarakat.
- i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Pengolah Penyajian Data dan Informasi**

- 1) Pengolah Penyajian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 180 huruf b mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun dan mengolah data untuk disajikan sebagai bahan informasi.<sup>33</sup>

**3. Kasub Pemberitaan**

**a. Pengolah Bahan Informasi**

- 1) Pengolah Bahan Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 175 huruf a

---

<sup>33</sup> Peraturan Walikota Makassar pasal 180 huruf a Nomor 16 Tahun 2014

mempunyai tugas mengolah dan mengumpulkan berbagai bahan dan data berupa informasi guna pembuatan dan perumusan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Makassar.

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :

- a) Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan.
- b) Mengumpulkan bahan dan data berupa informasi untuk pembuatan kebijakan Pemerintah Kota Makassar.
- c) Menginventarisir dan mengklasifikasikan berbagai informasi sesuai dengan jenis dan sifatnya.
- d) Membuat konsep naskah dinas yang berhubungan dengan bidang informasi.
- e) Mengolah berbagai produk kebijakan pemerintah kota untuk disajikan sebagai bahan informasi bagi masyarakat.
- f) Membuat berbagai model program sebagai bahan untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Makassar.
- g) Mempersiapkan bahan dan data dalam rangka jumpa pers yang dilaksanakan secara berkala.
- h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Penelaah Berita Dalam Mass Media

- 1) Penelaah Berita dalam Mass Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf b mempunyai tugas menelaah berbagai pemberitaan berupa artikel dan rekaman audio visual yang terdapat pada media cetak dan elektronik yang berhubungan dengan berbagai kebijakan Pemerintah Kota Makassar.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Peraturan Walikota Makassar pasal 175 huruf a Nomor 16 Tahun 2014

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Bentuk Pencitraan Politik Danny Pomanto Melalui Program Makassar Tidak *Rantasa* Oleh Humas Pemerintah Kota Makassar**

Humas pemerintah mempunyai peran ganda saat berurusan dengan media maupun publik, mereka harus mendukung posisi pemerintah menjelaskan manfaat langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. meralat informasi yang keliru serta berusaha menjelaskan sedemikian rupa informasi yang ada sehingga mudah dipahami. Disisi lain mereka juga harus mendukung media dan kepentingan publik. Menyalurkan keperluan media atau wartawan dan publik, misalnya membicarakan topik yang mungkin belum siap untuk dibahas oleh para pejabat. Namun sudah ramai dibicarakan di social network. Dalam beberapa hal, para petugas humas (termasuk juru bicara) tak jarang harus melakukan tugas seperti seorang reporter, mengumpulkan informasi untuk pers dan publik kemudian menerjemahkan ucapan para pakar pemerintah ke media dan jejaring social. Jadi prinsip-prinsip dasar humas di Negara demokratis tidak banyak berubah, di era ini hanya perlu modifikasi dengan menyesuaikan pada perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi yang menuntut kejujuran. Awalnya, humas lebih banyak digunakan dalam kepentingan komersial, sebagaimana dalam iklan, namun dalam perkembangannya humas banyak dilakukan dalam aktivitas komunikasi politik. Asistensi yang diberikan oleh para konsultan humas ini dimaksudkan agar kandidat biasa memenangkan persaingan politik melalui aktivitas politik yang mengangkat citra kandidat.

Salah satu kunci mewujudkan citra yang baik dari suatu pemerintahan atau Negara yaitu harus dimulai dari perbaikan di dalam negeri terlebih dahulu. Keadaan dalam negeri yang baik, kemudian didukung oleh strategi *public relations* yang baik pula, pasti akan berimbas pada penerimaan informasi yang memadai. Jika informasi itu memadai, maka publik dimanapun akan memiliki opini yang positif. Tetapi jika publik tidak memiliki informasi yang cukup, mereka cenderung berfikir secara salah dan emosional.<sup>35</sup> Dengan meminjam model komunikasi dari Laswell, keterkaitan antara faktor itu dielaborasi lebih jauh kedalam analisis unsur-unsur (*who*, komunikator) dan sasaran (*whom*, komunikan) informasi, rumusan pesan-pesan (*what*), akibat (*effect*) yang ditimbulkannya, serta media yang menjadi saluran (*channel*) primer maupun sekunder dari proses tersebut.<sup>36</sup>

Untuk itu dalam pemaparan hasil penelitian berikut ini ada beberapa pemaparan berbeda dalam proses penelitian, peneliti menemukan beberapa unsur-unsur komunikasi politik yang akan menjawab rumusan masalah diatas:

### **1. Komunikator**

Juru bicara sering kali disamakan dengan petugas humas, pada hal keduanya berbeda. Juru bicara menjadi komunikator "*official*" atau resmi yang memang ditunjuk untuk menyampaikan pesan komunikasi atau menyaring pernyataan pemerintah kepada khalayak atau publik dan media massa. Adapun petugas humas atau praktisi public relations adalah orang yang bertugas melakukan tugas-tugas public relations yang lebih kompleks, seperti membina

---

<sup>35</sup> Henry Subianto, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana. 2012. Hlm. 270

<sup>36</sup> Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008, Hlm. 18



hubungan internal, eksternal, dengan media, antar institusi, menjaga citra, melakukan promosi, audit komunikasi dan masih banyak lagi, bukan hanya sebagai badan atau institusi yang memiliki informasi yang bias diakses oleh publik dan media.<sup>37</sup> Humas bertindak sebagai komunikator dalam menyebarkan informasi terkait MTR. Disadari bahwa sepenuhnya konsep MTR perlu dukungan masyarakat, karena itu pemerintah kota akan selalu mengajak masyarakat bekerjasama secara kolektif sehingga masalah sampah di Makassar dapat segera dituntaskan. Setiap masyarakat dihimbau untuk mengubah kebiasaan membuang sampah disembarang tempat dan sembarang waktu seperti yang kerap dilakukan selama ini.<sup>38</sup>

Maka Humas berupaya memahami masalah-masalah yang dihadapi secara mendalam serta memiliki kearifan untuk memecahkan dengan cukup lancar dan serasi jangan sampai misalnya seseorang ingin mendapatkan informasi, selalu dihambat. Semua laporan dari khalayak ditampung, dipelajari, diamati sebelum diteruskan kepada atasan. Jadi Humas selalu melayani laporan-laporan atau masukan-masukan dari masyarakat. Tidak diabaikan begitu saja atau di diamkan mengingat fungsi dan peranan Humas yang selalu menjaga hubungan antara pemerintah dan khalayak maka diperlukan adanya getaran baru yang dapat menciptakan kondisi hubungan yang baik sebagaimana diharapkan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Henry Subiakto. *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana. 2012. Hlm.31

<sup>38</sup> Usman Nukma, 8 Jalan Masa Depan (Mainstream Baru Pembangunan Makassar), Makassar: Pelita Pustaka, 2014, hlm.167

<sup>39</sup> A.W. Wijaya. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Palembang: Bumi Aksara. 1991. Hlm.95



Dalam proses pengumpulan data yang telah dilakukan oleh peneliti di Kantor Balaikota Makassar, Peneliti mewawancarai Kepala subbagian Pengaduan Humas, Sebagai perwakilan dari Humas Pemerintah Kota Makassar, Sebagaimana Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Juana pada tanggal 2 juni 2016 yaitu:

*“Peran Humas bagian pengaduan bukan sebagai pengambil kebijakan atau pemecah masalah tetapi sub bagian pengaduan itu sebagai fasilitator atau penyambung lidah antara masyarakat yang datang pada kami mengeluh dengan SKPD sebagai unit kerja yang di adukan terkait dengan MTR sangat banyak sekali yang diadukan dan kami mempunyai SOP(standar operasional prosedur) dalam pengaduan baik secara formal dan informal. Jadi ini merupakan suatu tempat bagaimana citra walikota itu bisa dilihat dari berbagai jenis pengaduan”<sup>40</sup>*

Pernyataan diatas menegaskan bahwa humas subbagian pengaduan sangat berperan dalam menerima serta menyaring informasi hal-hal yang terkait dengan masalah kebersihan khususnya melalui program MTR. Keluhan dari masyarakat dalam bentuk aduan melalui media social, media visual dan via sms online dengan menggunakan S.O.P (Standar Operasional Prosedur).

Adapula Peran serta Fungsi humas di Instansi dan Lembaga Pemerintah yaitu:

- a. Memberi penerangan (informasi) kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, aktivitas, peraturan pemerintah
- b. Menanamkan kepercayaan atau meyakinkan masyarakat akan kecakapan, kejujuran & pengabdian aparatur dinas pemerintahan sebagai pelaksana *public service*

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Fitri Juana, Kepala Sub Bagian Pengaduan Humas Pemerintahan Kota Makassar, di Balaikota Makassar Pada tanggal 2juni 2016 pukul 09:30 wita

- c. Memberikan informasi tentang keinginan, aspirasi dari masyarakat agar pemerintah dapat mengambil keputusan yg tepat dan berguna
- d. Menyampaikan SOP agar peraturan yang dibuat berdasarkan kenyataan dan dapat diterima masyarakat
- e. Mengajak masyarakat agar mau beropini atau mengajukan pendapat kepada pemerintah

Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

*“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman (QS. Az-Zariyat /51 : 55)”<sup>41</sup>*

Dasar pemikiran humas dalam pemerintahan berlandaskan pada dua fakta dasar. *Pertama*, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui; karena itu, pejabat pemerintah mempunyai tanggung jawab guna memberi penjelasan kepada masyarakat. *Kedua*, ada kebutuhan bagi para pejabat untuk menerima masukan dari masyarakat tentang persoalan baru dan tekanan social, untuk memperoleh partisipasi dan dukungan dari masyarakat. Hanya dengan proses komunikasi demikianlah pemerintah dan para pemilih dapat mencapai suatu pengertian kesatuan yang positif.<sup>42</sup>

Dalam hal ini humas merupakan komunikator dalam pencitraan politik Danny Pomanto dilihat dari bagaimana humas berupaya dalam memberikan informasi

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Surah Az-Zariyat Ayat 55. Jakarta : Maghfirah Pustaka. 2006. Hlm. 523

<sup>42</sup> Frazier Moore, HUMAS: Membangun citra dengan komunikasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2005.Hlm.489

kepada khalayak dan menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.. sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Azis Hasan pada tanggal 15 april 2016 yaitu:

*“Peran dan Upaya Humas sangat membantu sekali dalam mendukung program MTR. karena humas menjadi terompet pemerintah untuk menyambung informasi. Sekalipun dia tidak bisa memberikan jawaban yang tuntas tetapi paling tidak jika ada hal-hal yang terkait mau itu masalah ataupun keluhan dengan kebersihan dia segera menghubungi saya. Dengan mengantisipasi Program MTR ini saya memasang iklan bentuk pengaduan terkait dengan masalah kebersihan dengan kontrak 1 tahun senilai 400jt. Sebagai bentuk wujud menyukseskan salah satu visi misi dari walikota Makassar yaitu program MTR yang sekaligus dapat memberikan good image kepada pemerintah kota Makassar Apalagi bisa kita liat citra walikota meningkat saat Makassar mendapatkan piala Adipura. Walaupun kenyataannya program MTR belum sepenuhnya berjalan dengan optimal tapi saya rasa semua itu sudah berjalan dengan baik. Yang dimana merupakan wujud nyata keberhasilan Danny Pomanto dalam mengawal Program MTR”<sup>43</sup>*

Pernyataan diatas mempertegas bahwa humas telah menjadi komunikator bagi pemerintah yang dimana upaya humas sangat diperlukan dalam pencitraan politik Danny Pomanto serta Program Makassar Tidak Rantasa demi menyukseskan program ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai lembaga-lembaga kehumasan baik media cetak maupun elektronik.

Penulis mendapatkan berbagai postingan dari grup facebook Humas Pemkot Makassar yang membagikan tautan berkaitan tentang “Makassar Tidak Rantasa” yang tiap saat membagikan tautan sehubungan dengan Partisipasi masyarakat di 14 kecamatan di posting tiap hari mau itu dalam bentuk gotong-royong, menanam tanaman hijau, membakar sampah dan kegiatan membersihkan lingkungan

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Abdul Azis Hasan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, di Kantor Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Makassar. Pada tanggal 15 april 2016 pukul 16:30 wita

lainnya. Berikut salah satu contoh penyampaian pesan MTR yang dibangun melalui social media seperti postingan dibawah ini:



Sumber: Facebook/ Humas Pemkot Makassar

Postingan diatas terlihat bagaimana humas pemkot Makassar menyampaikan informasi terkait dengan MTR tidak itu saja disemua kalangan banyak yang sudah mengetahui program MTR Khusus lurah, bertugas sosialisasi Gemar MTR dari rumah ke rumah (door to door) melalui brosur-brosur, sebelum aksi aksi bersama. Persoalan *rantasa* bukan hanya pada persoalan kebersihan, tetapi juga pada pola pikir dan perilaku. Ini akan menjadi langkah awal, untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat Makassar untuk lebih disiplin dan peduli, dan ini tentunya harus dimulai dari para pemimpin. diharapkan mampu

menekan terjadinya penumpukan sampah di seluruh tempat pembuangan sementara (TPS) seiring dengan pemberlakuan kebijakan jam operasional truk.

Apa yang disampaikan komunikator berupa pesan yang berisi informasi-informasi terkait dengan masalah sampah di perkotaan Makassar tentang program MTR baik itu dalam bentuk pengaduan dan keluhan yang ditampung, Semua laporan dari khalayak ditampung, dipelajari, diamati sebelum diteruskan kepada atasan/ pemerintah. Karena humas bertindak sebagai fasilitator atau penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah. Yang paling utama pesan yang disampaikan sampai ditelinga masyarakat baik itu berupa wacana ataupun seruan tentang MTR, Karena pesan yang membentuk sebuah Pencitraan. Dan hadirnya humas dapat membuat pencitraan politik Danny Pomanto semakin bagus dimata masyarakatnya dengan menyampaikan informasi yang bias yang menyenangkan kepada masyarakat, agar opini masyarakat tidak berkembang secara negatif atau tidak mengenakan bagi pemerintah.

## **2. Komunikas**

Khalayak komunikasi politik bukanlah wadah yang pasif yang ke dalamnya para pemimpin politik dengan berbagai karakteristik dan motif hanya menuangkan beraneka imbauan atau pesan dengan Bahasa, simbol, peranti, dan media yang menarik, penerima adalah partisipan yang aktif dalam komunikasi dengan sumber mengindera, mengintrepresentasikan, membayangkan dan menetapkan dan kalau tidak berbuat sendiri dengan cara yang memiliki nilai berita. Komunikan yang dimaksudkan disini adalah masyarakat/ khalayak yang menerima pesan, ketika penerima menerima *feedback* dalam suatu proses



komunikasi politik, atau pada saat ia meneruskan pesan-pesan itu kepada khalayak yang lain dalam kesempatan komunikasi yang berbeda, maka pada saat itu peran penerima telah menjadi sumber atau komunikator. Khalayak dapat memberikan respon atau umpan balik, baik dalam bentuk pikiran, sikap maupun perilaku politik yang diperankannya.<sup>44</sup> Seperti halnya peneliti menganggap Pesan yang disampaikan kepada khalayak tentang larangan membuang sampah dan apapun yang terkait tentang program MTR khalayak harus paham dan mengerti akan larangan membuang sampah di sembarang tempat.

Penanganan sampah memang membutuhkan waktu yang berkesinambungan, namun ketika masyarakat dapat bersinergi dengan pemerintah maka segala bentuk persoalan di kota Makassar akan dapat terselesaikan. Pemkot Makassar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itulah pemerintah kota menyasar seluruh kelompok masyarakat dengan menggunakan berbagai jargon yang dipandang efektif memancing minat masyarakat hidup bersih. Atas kesadaran melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali. Program inipun terus didengungkan dengan mensosialisasikannya hingga keseluruhan lapisan masyarakat, termasuk mereka yang bermukim di pemukiman padat seperti lorong-lorong.

komunikasikan yang dimaksudkan disini mencakup khalayak tapi yang ditujukan penyampaian pesan berfokus pada Camat, Lurah, Tokoh Masyarakat agar mensosialisasikan program MTR kepada masyarakat lainnya. Pemerintah melibatkan berbagai elemen termasuk aparat TNI kerja bakti dengan fokus

---

<sup>44</sup> Asep Saeful Muhtadi, Komunikasi Politik Indonesia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2008, Hlm.34

kelurahan serta lingkungan sekolah, alasannya sekolah sebagai tempat pembentukan karakter siswa sangat tepat untuk menanamkan budaya hidup bersih. Sebagaimana wawancara dengan ibu Risnawati Majid, kepala sekolah SD.Negeri Hartaco Indah yang mengatakan bahwa:

*“Pihak sekolah diberikan amanah dari pemerintah untuk mensosialisasikan program MTR, yaitu salah satu yang kita terapkan tiap Di sekolah kita menerapkan yang namanya ‘aku dan sekolahku tidak rantasa’.Di hari senin setelah upacara kita juga menerapkan program LISA (lihat sampah ambil) diawasi oleh wali kelas siswa-siswi memungut sampah menggunakan kantong plastik sampah yang telah dibagikan oleh pemerintah. Ditambah kegiatan ini dapat memberikan nilai moral kepada siswa akan kecakapan terkait dengan kebersihan.karena kebersihan itu merupakan suatu kebiasaan yang harus dibina dan dipupuk sejak dini. Siswa sangat antusias melakukan kegiatan tersebut ditambah lagi lingkungan sekolah disini sangat dekat dengan lingkungan pasar jadi kemungkinan banyak sampah itu lebih besar”<sup>45</sup>*

Para guru, sejatinya mendidik siswa agar memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan cara yang efektif untuk menanamkan pentingnya hidup bersih dan sehat kepada anak sehingga nantinya akan terbangun di dalam dirinya pola hidup bersih. Orangtua dan guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter hidup bersih, sehat dan mandiri Karena merekalah orang yang terdekat yang dijadikan contoh oleh anak-anak. Demikian pula dengan pendekatan agama, kampanye kebersihan lingkungan dipandang menjadi salah satu jalur sosialisasi efektif. Kebersihan sebagian dari iman. Slogan itulah yang kerap disampaikan untuk meningkatkan kesadaran warga untuk menciptakan kebersihan. Intinya adalah bahwa semua pihak harus berperan aktif dalam menyukseskan berbagai program untuk menciptakan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Risnawati Majid , Kepala Sekolah SD.Negeri Hartaco Indah kota Makassar. Pada tanggal 25 juli 2016 pukul 10:00 wita



kebersihan lingkungan. Tujuannya adalah mewujudkan Makassar Bersih. Peranan muballigh tentu sangat diperlukan karena mereka terus-menerus bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam setiap penyampaian tausiah, ceramah-ceramah di masyarakat, muballigh memiliki kesempatan paling luas dan paling efektif untuk mensoasialisasikan Makassar Bersih. Tak cuma masjid-masjid, tetapi juga di rumah-rumah warga para muballigh diharapkan dapat menjadikan Makassar Bersih sebagai bagian tak terpisahkan dari ceramah merek.<sup>46</sup> Sebagaimana wawancara salah satu Tokoh Agama ust. Azis di kota Makassar yang mengatakan:

*“Saya akui kebersihan di kota Makassar boleh dikatakan sudah tertanggulangi sedikit demi sedikit karena adanya program MTR karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Pernah dalam mengisi sebuah acara ceramah di salah satu masjid saya pernah membawakan tema kebersihan yang tertuang dalam hadist riwayat Tarmidzi yang artinya ‘sesungguhnya Allah itu baik cinta akan kebaikan,bahwa Allah itu bersih menyukai kebersihan, Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, Maha indah menyukai keindahan, karena itu bersihkan tempat-tempatmu’ dalam hadist tersebut telah tertuang makna bahwa Allah mencintai Kebersihan maka hendaklah kita juga harus menjaga kebersihan. Maka dari itu kita diharuskan menjaga kebersihan dengan dibantu dengan program MTR itu akan banyak membantu agar masyarakat tergerak hatinya untuk hidup bersih”<sup>47</sup>*

Penjelasan diatas mempertegas bahwa, dengan adanya Program MTR ini sangat membantu masyarakat untuk hidup bersih seperti hadist yang telah di paparkan diatas Bahwa Allah mencintai kebersihan. Itu sudah memberikam gambaran bagi kita untuk lebih mencintai kebersihan. Dalam hal ini tokoh

---

<sup>46</sup> Usman Nukma, 8 Jalan Masa Depan (Mainstream Baru Pembangunan Makassar), Makassar: Pelita Pustaka,2014. Hlm.177

<sup>47</sup>Wawancara dengan Ust.Azis,Tokoh Agama di kecamatan tamalate. Pada tanggal 25 juli 2016 pukul 10:00 wita

masyarakat merupakan komunikan (penerima) dapat menyampaikan pesan-pesan ke khalayak terkait dengan program MTR melalui ceramah.

### 3. Isi atau Pesan

Pesan dalam kegiatan komunikasi membawa informasi yang disampaikan oleh komunikator. Pesan selain membawa informasi juga memberikan makna kepada siapa saja yang menginterpretasikannya. Pesan merupakan konten atau isi dari kegiatan komunikasi secara umum, termasuk komunikasi politik.<sup>48</sup>

Menurut Danny Pomanto, sebenarnya ada dua persoalan tentang sampah masyarakat mempunyai kebiasaan membuang sampah disembarang tempat dan disembarang waktu. Kedua, manajemen persampahan yang belum maksimal. Kedua persoalan dari faktor penghambat itu harus secepatnya diubah dan diperbaiki. Sebab disadari sepenuhnya, bahwa program Gemar MTR sejatinya dimulai dari lingkungan pegawai pemkot Makassar dan unsur musyawarah pimpinan daerah (Muspida) Kota Makassar. “Harus berangkat dari SKPD Pemkot Makassar. MTR adalah agenda pertama pasangan DIA (Danny Pomanto-Syamsur Rizal).<sup>49</sup>

Kata *rantasa* memang sengaja digunakan untuk menggali kultur yang ada di dalam dinamika kehidupan warga Makassar. “Kita memunculkan *siri*’ (malu) dan menggerakkan hati masyarakat Makassar, karena program ini hanya dapat terlaksana jika seluruh komponen turut berpartisipasi,” jelas Danny Pomanto. pesan yang disampaikan melalui bahasa Makassar yang mudah dipahami oleh

---

<sup>48</sup> Henry Subiakto. Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi. Jakarta: Kencana. 2012. Hlm.46

<sup>49</sup> Usman Nukma, 8 Jalan Masa Depan (Mainstream Baru Pembangunan Makassar), Makassar: Pelita Pustaka, 2014, hlm.168

masyarakat kota Makassar menggunakan jargon yang dipandang efektif memancing minat masyarakat hidup bersih. Mendukung program MTR, kini dikampanyekanlah LISA (lihat sampah ambil). Struktur pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah menjadi tulang punggung memasyarakatkan LISA. Program LISA memang bisa berdaya ampuh manakala melibatkan seluruh elemen masyarakat dengan kesadaran bahwa kegiatan LISA tidak sekedar kerja bakti bersama. Mendukung Program ini, di apresiasi dengan program MABELLO (Makassar Bersih Lorong-lorong ta). Mabello sebagaimana namanya yang fokus ke lokasi marginal di lorong-lorong, maka program inipun menyentuh hingga ke kelurahan.<sup>50</sup> Sebagaimana hasil wawancara dengan Andi Alif Fadjri Luqman, S.sos. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Humas Pemerintahan Kota Makassar. Di Balaikota Makassar pada tanggal 28 mei 2016 yang mengatakan bahwa:

*“Pihak pemerintah beserta jajarannya telah banyak memperkenalkan tagline yang berkaitan dengan MTR saya ambil contoh LISA (lihat sampah ambil) bukan hanya sekedar memungut sampah akan tetapi lebih dari itu terkandung pesan, bagaimana menjunjung asas kekeluargaan, sehingga mampu mengubah pola pikir masyarakat agar menyadari pentingnya menjaga kebersihan di manapun dan kapanpun mereka berada. Intinya bagaimana menciptakan kebiasaan dengan mengedepankan nilai-nilai kebersihan. Jujur sebagai pemerintah kita harus fair dalam menanggapi kekurangan dari program MTR Karena itu semua kita kembalikan lagi pada masyarakat. Karena program ini dan pemerintahan ada untuk masyarakat. Tergantung masyarakat yang akan menilai kalau sifatnya menilai kemudian tergantung masyarakat kalau masyarakat ingin merakaskanya”<sup>51</sup>*

Pernyataan diatas menegaskan bahwa dibalik keberhasilan sebuah Program, itu semua tergantung dari masyarakatnya. Bagaiamana masyarakat bisa

---

<sup>50</sup> Usman Nukma, 8 Jalan Masa Depan (Mainstream Baru Pembangunan Makassar), Makassar: Pelita Pustaka, 2014, hlm.174

<sup>51</sup> Wawancara dengan dengan Andi Alif Fadjri Luqman, S.sos. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Humas Pemerintahan Kota Makassar. Di Balaikota Makassar pada tanggal 28 mei 2016 pukul 11:30 wita

paham dan ikut berpartisipasi dalam memajukan kota Makassar seperti istilah yang di keluarkan “Makassar dua kali tambah baik” Pemerintah sudah berusaha secara optimal mensosialisasikan Program MTR tinggal masyarakatnya yang menata apa yang sudah ada. Karena citra yang baik dari sebuah pemerintah kota sebagai jabatan publik akan kembali pada citra yang baik pada kota Makassar itu sendiri.

Memang perlu memotong tradisi membuang sampah sembarangan dengan membuang sampah yang benar pada tempatnya. Hal ini tentu tergantung pada perubahan mindset dan tradisi kita sendiri. MTR harus bisa melihat dari sisi ini. Budaya bersih hanya bisa dibangun secara sistematis tanpa proses tersebut, berbagai kegiatan kerja bakti setiap jumat, hanya akan berhenti pada Pencitraan.<sup>52</sup> Politik pencitraan sangat terkait erat dengan simbol-simbol yang dibangun oleh sang figur dan mesin politik yang menyertainya. Simbol yang dibangun secara terus menerus disosialisasikan akan menjadikan simbol tersebut menjadi milik bersama sehingga betul-betul diyakini kebenarannya. Simbol kedermawanan dan sosok yang merakyat (populis) dicerminkan oleh seorang figur melalui berbagai media dan instrumen. Kedermawanan terlihat dengan kehadiran seorang figur dihadapan khalayak ramai dengan memberikan sumbangan baik berupa uang maupun barang, sehingga dengan sekejap muncul citra dermawan. Biasanya yang menjadi sasaran kedermawanan tersebut adalah tempat-tempat ibadah dan pendidikan.<sup>53</sup>

Salahsatu bentuk pencitraan politik yang ditunjukkan oleh danny pomanto yang diposting dalam social media:

---

<sup>52</sup> Usman Nukma, 8 Jalan Masa Depan (Mainstream Baru Pembangunan Makassar), Makassar: Pelita Pustaka, 2014, hlm.172

<sup>53</sup> Pahmi Sy, Politik Pencitraan. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010. Hlm.4



*Sumber: facebook/ Makassar Tidak Rantasa*

Pada gambar ini menunjukkan bagaimana walikota berusaha mengajak masyarakat untuk sadar akan kebersihan lingkungan, dengan mencoba memungut sampah berusaha menyampaikan pesan yang tersirat melalui sebuah gambar atau dokumentasi serta memperkenalkan kepada masyarakatnya program LISA yang merupakan salah satu program lanjutan dari MTR melalui gambar diatas memberikan kesan agar mendapatkan citra yang baik dimata masyarakat melalui salah satu programnya yaitu MTR. Karena Pemerintah tentu harus menjadi stimulant untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki saat ini. Subtansinya adalah bahwa kebersihan itu sangat penting, namun yang tak kalah pentingnya adalah menjaga dan memelihara kebersihan. Masalah kebersihan butuh pola pikir. Oleh karena itu, yang perlu dibangun adalah kesadaran masyarakat. Misalnya, ketika melihat sampah, Ambil. Faktanya, janganakan melihat sampah ambil, tetapi malah sampahnya dibuang sembarang tempat, sehingga jadinya *rantasa* (jorok).



#### 4. Saluran

Saluran merupakan setiap pihak atau unsur yang memungkinkan sampainya pesan-pesan politik. Dalam hal-hal tertentu, memang terdapat fungsi ganda yang diperankan unsur-unsur tertentu dalam komunikasi politik, humas memerankan fungsi ganda disatu sisi, seperti telah dijelaskan diatas, iya berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan-pesan yang berasal dari pemerintah dan disisi lain, iya juga dapat berperan sebagai saluran komunikasi bagi lewatnya informasi yang berasal dari khalayak masyarakat.<sup>54</sup>

Hubungan masyarakat menjelaskan fungsi dan tugas penerangan dalam jajaran masing-masing. Peranannya sebagai wahana komunikasi ke dalam maupun ke luar. Kedalam berusaha menyelenggarakan program-program lembaga pemerintahan, keluar memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan. Penyelenggaraan komunikasi ke dalam dan ke luar berfungsi menyaring, mengelola, dan menyajikan informasi yang diperlukan sehingga sesuai dengan kebutuhan komunikasi dari kelompok sasaran yang dituju. Mengelola dan menyaring masukan dari luar menyelenggarakan komunikasi yang sehat kepada masyarakat, sehingga mereka mendukung dan menyetujui apa yang diharapkan.

Komunikasi Politik berfungsi sebagai jembatan yang dijembatani cita-cita dan aspirasi dengan masyarakat secara timbal balik, adanya semacam *give and take*. Aspirasi dan cita-cita masyarakat tertampung sehingga mereka merasa ikut serta dan dengan sendirinya ada dukungan dan dorongan dari masyarakat. Untuk itu perlu diciptakan situasi dan kondisi yang dapat menumbuhkan suasana

---

<sup>54</sup> Henry Subiakto. Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi. Jakarta: Kencana. 2012. Hlm. 34

kerjasama dan kebersamaan dalam upaya melahirkan tugas-tugas pokok yang di emban oleh humas itu sendiri. Sudah terlihat jelas peran dan upaya humas pemerintah kota makassar bisa dibilang sudah sangat optimal karena di media-media munculnya berita atau postingan iklan atau slogan-slogan yang kita jumpai di sudut ataupun pinggir jalan kota Makassar sudah mulai terlihat. Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan bapak Kasman Cahyadi Redaktur Politik Koran Harian Fajar, di Gedung Graha Pena Fajar pada tanggal 18 mei 2016 yang mengatakan bahwa:

*“Kalau upaya humas sangat terlihat, karena kebanyakan kita mengetahui MTR itu dari media-media artinya fungsi-fungsi kehumasan berjalan walaupun tanpa humas wartawan bisa dapat informasi itu untuk disebarluaskan tetapi indikatornya terkait dari program MTR ini semua bersumber dari humas dan saya rasa sudah cukup bagus. Karena nyatanya selama ini melalui koran-koran serta media social MTR bisa dikenal oleh masyarakat oleh karenanya citra walikota akan nampak sedikit demi sedikit. Sisa bagaimana pemerintah yang mengelolanya dengan baik”<sup>55</sup>*

Sesuai peranannya sebagai pengabdian untuk kepentingan umum, sebagai mediator antara pimpinan dengan publik, dan sebagai dokumentator, maka program humas dititik beratkan pada:

a. Program Pelayanan

Program ini berupa pelayanan data/informasi baik secara lisan maupun tertulis, termasuk penyelenggaraan display tetap dan pameran.

b. Program mediator

Program ini berupa penerbitan berbagai media massa, penyelenggaraan konferensi pers, wisata pers, menjawab surat pembaca, menanggapi tajuk rencana yang negatif dan lain-lain.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak Kasman Cahyadi Redaktur Politik Koran Harian Fajar, di Gedung Graha Pena Fajar pada tanggal 18 mei 2016 pukul 13:00 wita



### c. Program Dokumentator

Program ini berupa pembuatan dokumentasi film, foto rekaman (kaset audio dan video), transkrip pidato dan lain-lain lalu disebar ke khalayak tentang kebijakan suatu pemerintahan.

Dalam hal ini setiap lembaga atau instansi tentu ingin berhasil mencapai tujuannya, keberhasilan tersebut tidak dapat dicapai hanya berdasarkan kemampuan yang ada pada lembaga itu saja. Disamping itu perlu adanya pengertian, penerimaan dan keikutsertaan publiknya. Adanya unit kehumasan dalam pada setiap instansi pemerintah merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka penyebaran tentang aktivitas instansi tersebut baik kedalam maupun keluar yaitu kepada masyarakat pada umumnya. Humas merupakan suatu alat untuk memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran informasi melalui pers, radio, TV, social media dan media lainnya. Sebagaimana Hasil wawancara dengan Ibu Fitri Juana pada tanggal 2 juni 2016 yaitu:

*“Humas memiliki poxy bagaimana memberikan informasi dan pelayanan kepada masyakat kota Makassar baik itu staf-staf maupun kepala SKPD yang ada di kota Makassar dalam bentuk pengaduan masyarakat dapat mengeluhkan hal-hal yang tidak sesuai terkait Program MTR. Dalam pengaduan terdapat yang namanya SOP (Standar Operasional Prosedur) bagaimana mereka bisa memberikan aduan tersebut baik itu secara formal maupun informal, dalam artian mereka bisa memilih memberikan kritik dan saran bisa melalui media cetak, SMS online, melalui Telepon, melalui media social, Aplikasi SODARATA’ ataupun mereka bisa langsung datang ke kantor Humas Pemerintah kota Makasssar”<sup>56</sup>*

Pernyataan diatas menegaskan bahwa humas subbagian pengaduan sangat berperan dalam menerima serta menyaring informasi hal-hal yang terkait dengan

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Fitri Juana, Kepala Sub Bagian Pengaduan Humas Pemerintahan Kota Makassar, di Balaikota Makassar Pada tanggal 2juni 2016 pukul 09:30 wita

masalah kebersihan khususnya melalui program MTR. Keluhan dari masyarakat dalam bentuk aduan melalui media social, Aplikasi *Sodarata'* Pemerintah Kota Makassar, melalui Bagian Hubungan Masyarakat kembali memperkenalkan terobosan baru di bidang teknologi. Kali ini dengan meluncurkan aplikasi aduan terpadu digital bernama *Sodarata'*, yang dapat diakses seluruh warga kota Makassar melalui telepon cerdas. Dengan mengunduhnya, warga kota bisa berinteraksi langsung dengan birokrasi. Baik untuk menyampaikan saran, pujian, kritik, atau keluhan atas pelayanan aparat pemerintahan.

Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar, Firman Pagarra menjelaskan, aplikasi ini memang dibangun untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aduan. Apa pun masukan dari masyarakat, bisa langsung diteruskan kepada wali kota, pimpinan instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Adapun nama *Sodarata'* merupakan akronim dari *Sombere'* Danny untuk *Rakyatta'*. Diketahui, *Sombere'* yang dalam bahasa Makassar berarti sikap ramah, selalu menjadi slogan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto pada setiap program kerjanya. Aplikasi ini tidak sebatas menyediakan aduan, karena sifatnya interaktif. Aduan langsung ditanggapi bidang terkait. Sejumlah informasi penting seputar aktivitas dan program Pemkot akan ditampilkan secara berkala.<sup>57</sup> Media visual dan via sms online dengan menggunakan S.O.P (Standar Operasional Prosedur). Penulis memasukkan beberapa data yang di himpun dari humas pemkot Makassar tetang S.O.P pengaduan masyarakat melalui sms online:

---

<sup>57</sup> <http://makassar.merdeka.com/kabar-makassar/sodarata-aplikasi-pengaduan-terpadu-pemkot-makassar-160511b.html>, Diakses 12:52 PM. Tanggal 10 juli 2016

## S.O.P

## PENGADUAN MASYARAKAT VIA SMS ONLINE

ALUR KERJA	DOKUMEN TERKAIT	WAKTU	PENJELASAN
SMS DARI MASYARAKAT/PENGADU			
↓	SMS Masyarakat	5-10 Menit	Mencatat dan membukukan /mengarsipkan isi pengaduan ke dalam blangko aduan
STAFF PENGADUAN Mencatat Pengaduan	Blangko aduan Masyarakat		
↓			
KASUBAG PENGADUAN MASYARAKAT Verifikasi Aduan	Blangko Aduan	5-10 Menit	Kasubag pengaduan meverifikasi pengaduan masyarakat untuk di tujukan ke SKPD / leading sector yang membawahi yang bertanggung jawab atas pengaduan tersebut
↓			
KASUBAG PENGADUAN MASYARAKAT Koordinasi	Blangko Aduan	5-10 Menit	Kasubag pengaduan masyarakat berkoordinasi dan menyampaikan isi aduan ke unit kerja / SKPD yang bertanggung jawab atas hal pengaduan
↓			
PIMPINAN UNIT KERJA TERKAIT ( SKPD ) Tindak Lanjut Aduan	Blangko Aduan	I. 10 - 20 Menit apabila jawaban pengaduan dalam bentuk informasi II. jawaban teknis tergantung yang membutuhkan waktu 3 jam - 24 jam bahkan terkadang sehari atau lebih karna bersifat teknis, ini disebabkan karena SKPD butuh waktu dalam menindak lanjuti aduan yang bersifat teknis	Tindak lanjut aduan bisa berupa jawaban dan tindakan langsung di lapangan oleh unit kerja SKPD tersebut, dan wajib memberikan laporan atas tindak lanjut aduan yang ada, baik secara tertulis ( informasi ) ataupun melampirkan dengan gambar, video visual, audio visual oleh SKPD terkait untuk jawaban aduan yang membutuhkan (tindakan teknis yang harus di laksanakan dalam menjawab aduan )
↓			
KASUBAG PENGADUAN MASYARAKAT Memantau Tindak Lanjut Aduan	Blangko Aduan	Selama proses tindak lanjut aduan dari SKPD berlangsung	Memantau jawaban, bila di perlukan kasubag pengaduan masyarakat akan meninjau langsung ke lapangan terkait tindak lanjut pengaduan sampai selesai
↓			
STAF PENGADUAN MASYARAKAT Menyampaikan Jawaban Aduan	Blangko Aduan	5-10 Menit	Setelah ada jawaban final dari SKPD,kasubag pengaduan menunjuk staf pengaduan untuk kembali menghubungi si pengadu guna menyampaikan jawaban aduan yang sdh di selesaikan oleh SKPD/unit kerja terkait baik berupa Informasi, Gambar , Video Visual dan Audio Visual
↓			
Masyarakat	SMS ke Si Pengadu		
↓			
SELESAI			

Sumber: Subbagian Pengaduan Humas

Gambar diatas merupakan salah satu bentuk saluran yang dibuat oleh Humas dalam bentuk pengaduan via sms online. Dengan menggunakan SOP yang sudah dibuat dan yang akan digunakan dalam menyaring informasi-informasi yang masuk terkait tentang masalah kebersihan yang didalamnya terdapat Pengaduan, komentar-komentar serta saran dari khalayak masyarakat.

### **5. Gangguan (*Noise*)**

Dalam menyampaikan pesan terkait pogram MTR pastinya terdapat berbagai gangguan. Gangguan adalah suatu hal, getaran, atau gelombang yang mendistorsi pengiriman pesan dalam proses komunikasi. Gangguan menyebabkan perbedaan antara pesan yang diterima oleh penerima (receiver) dengan pesan yang dikirimkan oleh sumber (source).<sup>58</sup> Dalam penelitian ini terdapat gangguan penyampain pesan yang dimana penerima tidak menerima pesan secara menyeluruh akibatnya akan mengakibatkan kesalah pahaman. Ditinjau dari gangguan yaitu:

Gangguan psikologis merupakan gangguan yang disebabkan karena sudah adanya pemikiran lain di kepala penerima, sehingga membuat penerima seolah tidak setuju atau tidak bisa menyerap dengan baik mengenai pesan yang dikirimkan oleh sumber. Dalam penelitian ini gangguan tersebut yang dimana masyarakat mengira plastik sampah yang dibagikan secara gratis untuk seluruh warga kota makassar sekitar 2 juta kantong plastik tapi nyatanya tidak dibagikan

---

<sup>58</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan\\_\(komunikasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_(komunikasi)) Diakses 12:52 PM. Tanggal 16 agustus 2016

secara gratis padahal terkait soal kantong sampah dana yang disediakan itu sebanyak 4 Milyar. Seperti yang dikutip dalam berita

Pada tahap sosialisasi ini, Pemerintah Kota Makassar menyediakan dua juta kantong sampah sortir gratis bagi warga Kota Makassar. serta Anggaran pengadaan kantong plastic sejumlah 4M. Pembagian itu melalui camat, lurah dan bank sampah yang ada di daerah masing-masing. Penggunaan kantong plastik sampah sortir bertujuan agar pengurangan sampah serta penyortiran jenis sampah bisa langsung dilakukan dari rumah warga. Pada tahap sosialisasi, baik warga mampu dan kurang mampu diberi jatah empat jenis kantong sampah secara gratis. Kantong oranye akan digratiskan selamanya bagi warga miskin, sedangkan kantong hijau harus dibeli sendiri oleh warga mampu apabila kantong sampah itu rusak. Kantong yang juga disebut kantong sampah Makassar Tidak Rantasa (MTR) atau Makassar Tidak Kotor itu memiliki ketahanan lebih dibanding kresek biasa karena ketebalan plastik mencapai 5 mm.<sup>59</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Syamsur Rahim sebagai Penikmat warung kopi di kedai Pojok pada tanggal 13 mei 2016 yang mengatakan bahwa:

*“Di gendang dua yang telah disediakan kita lihat jarang melihat terdapat plastik sampah padahal dana yang disediakan untuk itu sangat banyak sekitar 4 milyar itu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan pada warga bahwa dananya dikemanakan jadi apa yang dikatakan pemerintah atau yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataannya”*<sup>60</sup>

Pernyataan diatas mengatakan kenyataan bahwa dana untuk kantong plastik sampah itu sudah menyediakan dana dalam jumlah yang banyak tapi nyatanya saat dibagikan kantong plastik sampah diperjual belikan oleh pihak

<sup>59</sup> <http://bbm.liputan6.com/read/2467984> di akses pada 10:00 P.M Tngal 16 agustus 2016

<sup>60</sup> Wawancara dengan Syamsur Rahim sebagai Penikmat warung kopi di kedai Pojok pada tanggal 13 mei 2016 pukul 12:30 wita



kelurahan dalam hal ini gangguan psikologis selama ini yang berlangsung di pikiran Masyarakat. Sehingga gangguan itu dikarenakan manajemen persampahan yang kurang bagus padahal pihak pemerintah telah menyediakan serta mengamanatkan kepada jajarannya mengatur pembagian kantong plastik sampah tapi pesan yang disampaikan tidak seperti yang di harapkan masyarakat. Sehingga menimbulkan gangguan psikologis dalam menyampaikan komunikasi. Tetapi dalam hal ini gangguan yang terjadi tidak mempengaruhi terhambatnya program MTR.

Adapun peningkatan citra walikota Danny Pomanto berkat Program MTR yang telah berjalan 15 Juni 2014 hingga saat ini yang memperoleh piala Adipura dua kali selama berjalannya program MTR yaitu:



*Sumber: facebook/ Humas Pemkot Makassar/ Makassar Tidak Rantasa*

Gambar diatas telah memberikan gambaran serta wujud nyata keberhasilan Walikota Danny Pomanto dalam mengawal Makassar Tidak *Rantasa* beserta Masyarakat kota Makassar dengan memperoleh piala Adipura. Pada gambar

sebelah kiri merupakan foto Walikota Makassar Danny Pomanto dengan Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar Firman Pagarra saat memperoleh Piala Adipura yang pertama tahun 2015 lalu. Pada gambar sebelah kanan, di tahun berikutnya Walikota berhasil mendapatkan piala Adipura di Kabupaten Siak, Provinsi Kepulauan Riau, yang telah di anugerahkan kepada Kota Makassar pada tahun 2016. Postingan di atas telah mewakili peningkatan citra Walikota Makassar melalui Program MTR. Adapun postingan dari pihak masyarakat yang sangat bangga akan keberhasilan kota Makassar yaitu:



*Sumber: facebook/ Makassar Tidak Rantasa*

Bertepatan dengan diperolehnya piala adipura, salah seorang masyarakat memposting foto bersama kedua piala adipura dengan bangga yang telah diperoleh kota Makassar berkat prestasi Walikota Makassar serta jajaran dan masyarakat kota Makassar melalui program MTR.

Dalam hal ini peneliti telah menemukan keterkaitan antara unsur-unsur komunikasi politik diatas bahwa bentuk Pencitraan Politik Danny Pomanto



melalui Program Makassar Tidak Rantasa, dilihat bagaimana humas telah bertindak sebagai komunikator menyampaikan informasi dan menjadi penyambung lidah antara pemerintah dengan khalayak tentang pentingnya menjaga kebersihan dan masyarakat menjadi komunikan atau penerima pesan, yang dimana pesan berisi tentang hal-hal yang terkait tentang masalah kebersihan, pesan yang membentuk pencitraan politik Danny Pomanto melalui berbagai saluran-saluran informasi dari berbagai media dan memberikan feedback yaitu berupa tanggapan dari masyarakat baik itu negatif maupun positif yang akan terjawab dirumusan masalah kedua.



## **B. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pencitraan Danny Pomanto Melalui Program Makassar Tidak Rantasa'**

Danny Pomanto mengatakan bahwa kesuksesan program pemerintah Gemar MTR (gerakan masyarakat Makassar tidak Rantasa) adalah meningkatnya partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat menurut Danny menandakan semakin tingginya wujud dari keberhasilan program tersebut. Menurut pasangan Syamsu Rizal ini, MTR merupakan program yang dititik beratkan pada penanaman perubahan pola pikir dan tingkah laku dalam masyarakat. Keberhasilan MTR bukanlah dinilai dari kebersihan lingkungan semata, namun ia juga harus tercermin pada wujud partisipasi masyarakat yang semakin sadar berpartisipasi secara massif dan kompak menjaga lingkungannya. kelangsungan program Makassar tidak Rantasa haruslah senantiasa terjalin silaturahmi yang baik dalam kelurahan binaan. Karenanya kita akan terus menjalin silaturahmi yang baik antara RT, RW, tokoh masyarakat, dan Lurah di kelurahan binaan. Memberi contoh dan motivasi sehingga masyarakat akan tergerak dengan sendirinya untuk bersama-sama dengan kami memperhatikan kebersihan lingkungan, ucapnya. Hal ini dibenarkan Ilham Arief Sirajuddin. Menurutnya keberhasilan MTR memanglah harus dicontohkan secara leadership. Harus dicontohkan dari pemimpinnya,

kepala dinasny, hingga ke petugas kebersihan di bawah lalu diikuti dengan partisipasi masyarakat, itu baru disebut berhasil, ucap IAS.<sup>61</sup>

### 1. Tanggapan Positif

Berdasarkan hasil wawancara di beberapa masyarakat maupun kalangan pemerintah mengenai tanggapan masyarakat terhadap Pencitraan Danny Pomanto Melalui Program Makassar Tidak *Rantasa*'. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bapak Abdul Azis Hasan pada tanggal 15 april 2016 yang mengatakan:

*"Selama ini pak danny pomanto dengan program MTR ini iya harus mampu menyiapkan sarana dan prasarana agar masyarakat bisa gunakan. Buat apa menyuruh buang sampah pada tempatnya. Sedangkan tidak menyiapkan tempatnya. Bagusnya sekarang walikota telah menyiapkan 300 unit kendaraan, baik itu mobil container, dam truck dan mobil Tangkasaki' itu semua yang mendukung program MTR. Kalau mau dikatakan pencitraan iya, tetapi semua itu diiringi dengan memberikan tindak lanjut yang nyata dan apa yang kita liat sekarang indikatornya, ukurannya dan keberhasilannya dengan kerjasama yang dilakukan antara masyarakat dan pemerintah itu kan kita bisa berhasil mengawal kota ini mendapatkan Adipura"*<sup>62</sup>

Karena apa yang dijelaskan diatas mengatakan pencitraan danny pomanto sangat terlihat dari bentuk keberhasilan dari pemerintah kota beserta jajarannya memperoleh piala Adipura. Tetapi dalam hal ini dari pihak pemerintah maupun masyarakat masih merasa kurang atas program MTR dilihat dari sarana dan prasarana yang belum memadai tapi semua itu kembali pada indikatornya dan dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Adapun pendapat lain

---

<sup>61</sup> <http://indotimnews.com/walikota-makassar-partisipasi-masyarakat-sukseskan-mtr/>, Diakses pada hari rabu 27 juli 2016

<sup>62</sup> Wawancara dengan Abdul Azis Hasan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, di Kantor Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Makassar. Pada tanggal 15 april 2016 pukul 16:30 wita

sebagaimana dengan hasil wawancara Usman faqi sebagai Penikmat warung kopi di kedai Pojok pada tanggal 13 mei 2016 yang mengatakan: .

*“Jika pemerintah serius mengelolah MTR maka secara otomatis rating pak danny akan meningkat dan citranya akan baik dimata masyarakatnya. Tapi yang kita lihat penilaian tiap masyarakat berbeda-beda ada yang negatif dan positif. saya pribadi kalo mau menilai dari segi kualitas, kinerja pemerintah masih kurang kita liat yang dimana kantong plastik sampah nyatanya belum tersebar dalam masyarakat itu dulu contoh kecil.semua yang dilakukan danny pomanto mengenai kegiatan MTR jika masyarakat melihat melalui media. Maka kebanyakan yang menilai itu hanya pencitraan semata. Tapi saya menilainya positif karena yang saya nilai itu tingkat keberhasilannya. Bagaimana pak danny telah memboyong piala adipura. Jadi realitanyanya disini jika MTR berjalan optimal maka citra pak Danny Pomanto akan bagus itu saja”<sup>63</sup>*

Adapun masyarakat yang menilai positif pencitraan Danny Pomanto dilihat dari tingkat keberhasilannya dalam mengawal masyarakat agar ikut bekerjasama dalam menyukseskan program MTR yang pada akhirnya mendapatkan piala adipura untuk kota Makassar. Andi Alif Fadjri Luqman, S.sos. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Humas Pemerintahan Kota Makassar. Di Balaikota Makassar pada tanggal 28 mei 2016 yang mengatakan bahwa

*“Jelas pencitraan pak Danny sangat terlihat terlebih lagi setelah dia mengusung program MTR, tidak mungkin suatu pemerintahan mengabaikan yang namanya popularitas/pencitraan karena lewat situlah kita di kenal dan dengar oleh masyarakat,apalagi diliat dari sisi penghargaan kan kita sudah dapatkan piala adipura. terlebih lagi dalam menjalankan suatu program tidak lngsung berhasil dibutuhkan tahap-tahap apalagi demi memberikan pengertian terhadap masyarakat banyak untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam suatu kebijakan sehingga menimbulkan citra yang positif bagi pemerintah”<sup>64</sup>*

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Usman faqi sebagai Penikmat warung kopi di kedai Pojok pada tanggal 13 mei 2016 pukul 12:50 wita

<sup>64</sup> Wawancara dengan dengan Andi Alif Fadjri Luqman, S.sos. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Humas Pemerintahan Kota Makassar. Di Balaikota Makassar pada tanggal 28 mei 2016 pukul 11:30 wita

Penjelasan diatas tidak jauh beda dengan pernyataan sebelumnya pencitraan Walikota Dany Pomanto dilihat dari tingkat keberhasliannya mengawal program MTR setelah iya memperoleh Piala Adipura. Yang akan membentuk Politik pencitraan yang dimana memainkan peran sangat penting dalam mengkontruksi sosok sang figur yang sama sekali tidak dikenal dan tidak dekat dengan rakyat tiba-tiba “mendadak” menjadi populer bahkan melebihi popularitas tokoh setempat, tentu memiliki kekuatan yang super dahsyat yaitu “pencitraan”.

Pencitraan yang sangat kuat tersebut tercermin dalam semakin menguatnya simbol-simbol yang dimainkan secara silih berganti dan sangat selektif. Seperti simbol kedermawanan, populis, agamis, energik dan lainnnya semakin hari dikokohkan dan menguat bahkan seolah-olah sosok atau figur yang satu-satunya dapat mengatasi segala problem yang dihadapi masyarakat. Politik pencitraan adalah sesuatu yang tampak oleh indera, tetapi tidak memiliki eksistensi subtansial, karena ketertutupan realita. Ketertutupan substansi tersebut bila berjalan secara terus menerus akan membawa implikasi yang kurang baik bagi perkembangan politik kedepan, karena popularitas seorang tokoh atau juga institusi politik misalnya tidak berpijak pada kualitas politik yang sesungguhnya, tetapi populer karena dibuat-buat. Akhirnya partisipasi politik masyarakat juga terkondisi oleh citra bukan oleh nurani yang berpijak pada realitas.<sup>65</sup> Yang akan menimbulkan tanggapan-tanggapan negatif seperti halnya yang akan dipaparkan pada poin kedua.

---

<sup>65</sup> Pahmi Sy, Poitik Pencitraan. Jakarta: Gaung Persada Press. 2010. Hlm.4

## 2. Tanggapan Negatif

Selain dari informan yang beranggapan positif disini juga peneliti menemukan beberapa tanggapan negatif tentang pencitraan Walikota melalui Program MTR. Peneliti menjadikan penikmat warung kopi sebagai sampel utama dalam mewakili tanggapan masyarakat. Disini peran Pemerintah ataupun responnya sangat dibutuhkan dalam program MTR, serta dibutuhkan tanggapan masyarakat. Dimana masyarakat menginginkan lebih dari apa yang terjadi sekarang walaupun sudah banyak kemudahan dalam mengetahui sebuah program tapi masyarakat belum banyak yang paham akan sebuah Program MTR yang di usung oleh pemerintah kota Makassar. Adapula pendapat informan bernama Kasman Cahyadi Redaktur Politik Koran Harian Fajar, di Gedung Graha Pena Fajar pada tanggal 18 mei 2016 yang mengatakan:

*“selama ini yang saya liat sosialisasi pemerintah melalui Program MTR ini hanya dikalangan atas yang tidak menyentuh langsung kerumput, yang dimaksudkan sosialisasinya kurang merata hanya dikalangan pemerintah saja harusnya camat dan lurah yang bekerja ekstra dalam menyosiasikannya Karena pengetahuan masyarakat tentang MTR masih minim harusnya pemerintah harus cakap dalam mengantisipasi apapun kekurangan dalam program tersebut karena tidak semua orang akan menilai bagus apa yang kita kerjakan”*

Sosialisasi mempengaruhi kualitas interaksi antara masyarakat dan pemerintahnya. Apabila suatu sosialisasi gagal untuk mempengaruhi perilaku masyarakatnya, maka semua kehidupan politik dan semua kebijakan yang membutuhkan dukungan dari publik akan gagal dan tidak berfungsi pula. Disini peran Pemerintah ataupun responnya sangat dibutuhkan dalam program MTR, masyarakat menginginkan lebih dari apa yang terjadi sekarang walaupun sudah banyak kemudahan dalam mengetahui sebuah kebijakan tapi masyarakat belum



banyak yang paham akan sebuah Program yang di usung oleh pemerintah kota Makassar.<sup>66</sup> Tetapi dalam hal ini kurangnya sosialisasi bukan karena kesalahan dari pihak pemerintah saja. Melainkan rasa ketidak ingin tahuan masyarakat atau ke ikut sertaannya dalam program MTR. Karena kebanyakan masyarakat bersifat apatis atau tidak peduli. karena tidak semua program akan berjalan secara instan. Semua itu membutuhkan proses yang cukup lama dan akan berbuah kepada keberhasilan dari suatu pemerintahan kota. Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan Syamsur Rahim sebagai Penikmat warung kopi di kedai Pojok pada tanggal 13 mei 2016 yang mengatakan bahwa:

*“Program MTR ini sudah cukup bagus cuman pelaksanaanya yang masih kurang beres contohnya gendang dua banyak yang rusak dan tidak berfungsi ditambah lagi kantong plastik sampah yang tidak dibagi secara merata malahan ada isu kantong plastik sampah diperjual belikan padahal dana yang diperuntukan untuk itu nilanya sangat banyak. Cuman ada beberapa bagian yang sepertinya pak Danny tidak kelola dengan bagus maka citra danny akan negatif dimata masyarakatnya. saya pribadi menilai program ini belum berjalan optimal jika didalamnya yang di tonjolkan hanya pencitraan semata bukan wujud nyata”<sup>67</sup>*

Penjelasan diatas menegaskan pada alokasi dana yang tidak tepat sasaran dan mengakibatkan anggapan negatif muncul dari masyarakat. Adapun pendapat yang berbeda Seperti dalam hasil wawancara dengan Nurul Azizah sebagai Penikmat warung kopi di kedai Pojok pada tanggal 13 mei 2016 yang mengatakan:

*“Selama ini program pemerintah yang paling gencar dilakukan sejauh ini adalah program Makassar tidak Rantasa yang di usung oleh walikota Makassar, bagaimana tidak, saya lihat di tembok-tembok TK,SD dan SMP di kota Makassar banyak bertuliskan slogan bertemakan MTR dan*

---

<sup>66</sup> Henry Subiakto, *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Jakarta: Kencana. 2012. Hlm.63

<sup>67</sup> Wawancara dengan Syamsur Rahim sebagai Penikmat warung kopi di kedai Pojok pada tanggal 13 mei 2016 pukul 12:30 wita



*dikelurahan sekitar tempat tinggal saya. Sering mengadakan kerja bakti, memang banyak yang telah mengetahui program ini akan tetapi nyatanya tidak semua masyarakat kota makassar yang merasakan efeknya atau feedback seperti halnya pengangkutan sampah yang tidak menyeluruh. kebanyakan cuman di sekitaran perkotaan saja. Tidak masuk ke kompleks atau pemukiman. Jadi kitanya kewalahan memakai jasa pengangkut sampah yang bisa memakan biaya 5-10 rb sekali angkut. Sebenarnya semua itu kembali pada yang mengurus masalah persampahan, jika di manage dengan baik maka penilaian kita kepada walikota akan melahirkan kesan yang positif<sup>68</sup>*

Pernyataan diatas mempertegas bahwa memang program MTR yang paling gencar dilakukan tetapi seluruh lapisan masyarakat di kota Makassar belum semua merasakannya. Masyarakat menginginkan bukti dari apa yang telah dijanjikan. Mereka tidak menemukan sosok walikota dalam program MTR sebelum mereka mendapatkan pelayanan yang harusnya mereka dapatkan semenjak berjalannya program MTR. Karena masyarakat hanya menilai semuanya sia-sia jika hanya mereka yang merasakan *feedback* dari kalangan pemerintah melalui Program MTR. Adapun anggapan bahwa walikota memungut sampah merupakan pencitraan semata dalam akun social media berikut:



*Sumber: facebook/ Makassar Tidak Rantasa*

<sup>68</sup> Wawancara dengan Nurul Azizah sebagai Penikmat warung kopi di kedai Pojok pada tanggal 13 mei 2016 pukul 14:00 wita

Gambar diatas merupakan tanggapan negatif dari pencitraan yang ditampilkan oleh walikota Makassar. Karena komentar-komentar seperti itulah yang akan membangun semangat pemerintah kota Makassar agar lebih memberikan yang terbaik. Karena untuk mencapai sebuah keberhasilan yang mutlak dibutuhkan tahapan terlebih dahulu. Adapun tanggapan negatif lainnya Sebagaimana wawancara salah satu Tokoh Masyarakat ust. Azis di kota Makassar yang mengatakan:

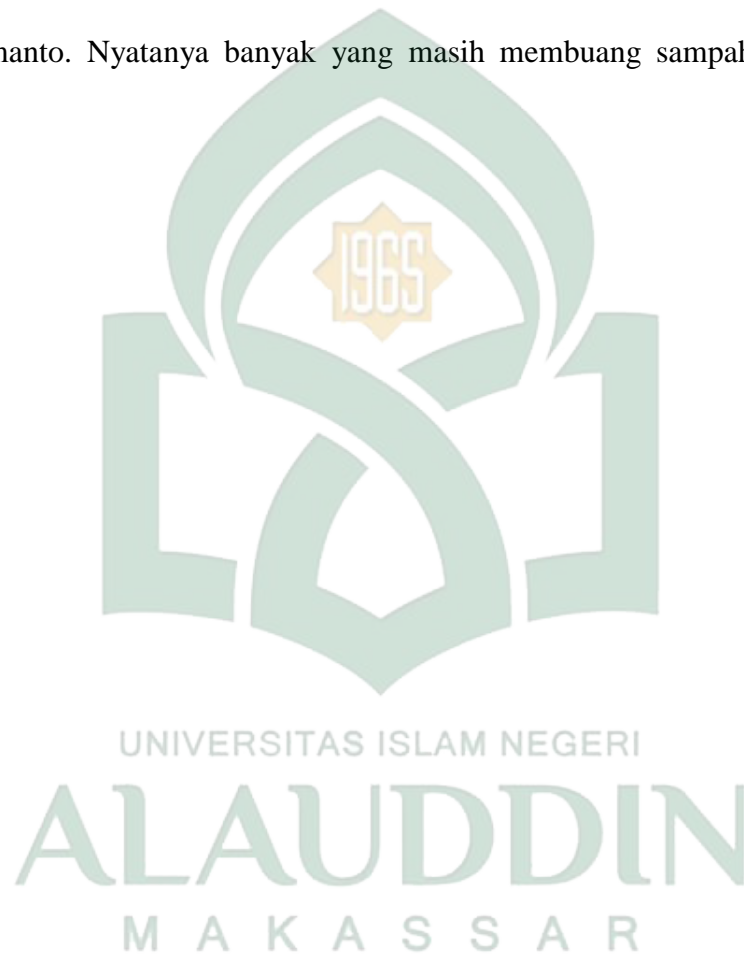
*“Dinilai dari segi negatif sosialisasi program MTR kita lihat belum maksimal karena masih kurangnya kesediaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pola hidup sehat dan selain itu sampah masih berserakan di mana-mana apalagi dilingkungan pasar dan sekitarnya serta kanal-kanal yang tidak terurus yang masyarakat yang tinggal disekitaran kanal berpotensi untuk terserang penyakit. Harusnya Walikota peka dalam menanggapi hal ini. Jangan hanya di lorong-lorong saja yang di tata”<sup>69</sup>*

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang. Meningkatkan kesadaran untuk membuat lingkungan bisa bersih tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu perubahan perilaku yang menyeluruh dan bertahap. Karena perilaku hidup bersih dan sehat harus menjadi bagian dari perilaku sosial setiap individu dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Perilaku bersih selain ditentukan oleh faktor lingkungan, juga terkait dengan tradisi yang telah melembaga di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, memang perlu memotong tradisi membuang sampah sembarangan dengan membuang sampah yang benar pada tempatnya. Hal ini tentu tergantung pada perubahan *mindshet* dan tradisi diri sendiri. MTR harus bisa melihat dari sini. Pemberian sanksi denda

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Ust.Azis,Tokoh Msyarakat di kecamatan tamalate. Pada tanggal 25 juli 2016 pukul 10:00 wita

kepada masyarakat untuk pelanggaran membuang sampah sembarangan, dimana Perda No. 4 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Memberikan sanksi kepada masyarakat ditetapkan sebesar Rp. 5 juta untuk pelanggaran masyarakat yang sembarang membuang sampah. Tapi hal ini tidak di pertegas oleh Walikota Danny Pomanto. Nyatanya banyak yang masih membuang sampah sembarang tempat.<sup>70</sup>



---

<sup>70</sup> Usman Nukma, 8 Jalan Masa Depan (Mainstream Baru Pembangunan Makassar), Makassar: Pelita Pustaka, 2014, hlm.172

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian diatas yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Bentuk Pencitraan Walikota Makassar melalui program MTR oleh humas Pemkot Makassar. Walikota memberikan amanah kepada Humas untuk memberi penerangan (informasi) kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, aktivitas, peraturan pemerintah, menanamkan kepercayaan atau meyakinkan masyarakat akan kecakapan, kejujuran dan pengabdian aparatur dinas pemerintahan sebagai pelaksana *public service*, memberikan informasi tentang keinginan, aspirasi dari masyarakat agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dan berguna, menyampaikan SOP agar peraturan yang dibuat berdasarkan kenyataan dan dapat diterima masyarakat, Mengajak masyarakat agar mau beropini atau mengajukan pendapat kepada pemerintah terkait dengan Program MTR. Ditinjau melalui unsur-unsur komunikasi politik yang dimana humas bertindak sebagai komunikator dan masyarakat sebagai penerima. Untuk menyampaikan pesan yang mudah diterima oleh masyarakat melalui berbagai saluran baik itu media cetak media visual dan media social untuk berusaha menaikkan citra walikota Makassar. Karena Walikota berserta jajarannya khususnya humas telah menunjukkan kinerjanya sehingga kenyatannya kota makassar dua kali memperoleh piala adipura secara otomatis menaikkan citra positif walikota Makassar

itu semua berkat kerjasama dari pihak pemerintahan dan masyarakat yang dijembatani oleh humas sehingga Program MTR berjalan seperti semestinya. Walaupun masyarakat menilai sosialisasi Program MTR masih kurang. Tetapi semua itu tergantung kepada pemerintah dan masyarakat dalam menyukseskan program MTR.

2. Tanggapan masyarakat terhadap pencitraan Danny Pomanto melalui Program Makassar Tidak *Rantasa*’, berupa tanggapan positif dan negatif. Kenyataannya Program MTR yang paling populer dimata dan telinga masyarakat diantara program-program pemerintah kota Makassar miliki. Dalam hal ini jika diliat politik pencitraaan Danny Pomanto yang semakin hari semakin positif dimata masyarakatnya karena mengusung kebersihan kota Makassar yang dilain sisi politik pencitraannya berdampak positif dalam karirnya sebagai jabatan publik. Walikota makassar untuk kedua kalinya memperoleh piala adipura setelah memenangkan piala adipura kirana wujud nyata bagaimana citra itu dibangun dari salahsatu program yang diunggulkan akan berubah citra positif dimata sebagian masyarakat. Tetapi dilain sisi adapun anggapan negatif yang dapat melahirkan kurangnya kerjasama atau komunikasi antara masyarakat dan pemerintah karena walikota cuman dipandang dari segi kekurangan dari Program MTR yang belum efektif dimata masyarakat.

## **B. Saran**

1. Diperlukan adanya kesadaran penuh dari masyarakat akan sebuah kebijakan karena keberhasilan suatu tujuan bersumber dari segala pihak.

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak humas sudah sangat maksimal. tetapi penyampaian tidak disertai dengan pengaplikasian yang kurang sesuai karena konsep MTR membutuhkan banyak-banyak evaluasi serta peningkatan kinerja dari pihak pemerintahan yang terlibat dan dibutuhkan ketegasan dari pihak pemerintah kota Makassar.

2. Dalam hal ini diperlukan komunikasi dua arah yang menjadi peran penting humas karena kurangnya sosialisasi politik melalui Program MTR serta Keikutsertaan masyarakat yang masih kurang. Karena yang terlihat kenyataannya proses penciptaan kredibilitas membutuhkan waktu lebih karena pesan harus dibangun berdasarkan keyakinan dan jangkauan tidak dapat langsung berjalan secara bersamaan semua itu membutuhkan proses.
3. Perlu dikembangkannya fasilitas-fasilitas yang masih kurang dalam program MTR dimana kantong sampah plastik yang tidak dibagikan secara merata yang padahal itu sudah disediakan dengan dana yang besar. Maka pemerintah harus dikelola dengan baik apa-apa saja yang telah menjadi hak dari masyarakat. Karena kepuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah akan menghasilkan citra yang positif di mata masyarakatnya kalau itu semua di kelolah dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Membangun Citra Partai Politik Masa Depan, (universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015, sebuah *skripsi*).
- Ardianto, Elvinaro, Dasar-Dasar Public relations, Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2006
- Arafat, Yaser Muhammad. Peranan Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS) Dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Brebes, (universitas pancasakti Tegal 2013, sebuah *skripsi*).
- Bangin, Burhan, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Cangara, Hafied, Komunikasi politik, Jakarta: Rajawali Pers. 2009
- Cangara, Hafied, Komunikasi Politik (Konsep, Teori, dan Strategi), Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada. 2011
- Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta : Maghfirah Pustaka. 2006
- Ilham, "Gerakan Makassar Tak Rantasa", Tribun News.com. 24 mei 2014.  
<http://www.tribunnews.com/regional/2014/05/24/gerakan-makassar-tak-rantasa-mulai-mulai-> di akses 10:00 PM. Tanggal 27 februari 2016)
- IndotimNews, "Walikota Makassar: Partisipasi Sukseskan MTR", Situs Resmi IndotimNews.<http://indotimnews.com/walikota-makassar-partisipasi-masyarakat-sukseskan-mtr/>, Diakses 20:00 AM. Tanggal 27 juli 2016
- Lesmana, Giles G. Kopol PR Politik. Scribd. *Sebuah Jurnal*
- Moleong, LexyJ, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosada karya, 2010)



Liputan6.com,” Gerakan Revolusi Mental dari Walikota Makasar”. Situs resmi

Liputan6.com. <http://news.liputan6.com/read/2130046/gerakan-revolusi-mental-dari-walikota-makassar>. Diakses 12:52 PM. Tanggal 10 juli 2016

Maria R, Elisabeth. Strategi Peran Praktisi Public Relations Dalam Partai Politik Baru, (universitas Indonesia, Jakarta 2014, sebuah skripsi).

Merdeka.com, “Sodarata’! Aplikasi pengaduan terpadu Pemkot Makassar”, situs resmiMerdeka.com.<http://makassar.merdeka.com/kabarmakassar/sodarata-aplikasi-pengaduan-terpadu-pemkot-makassar-160511b.html>,Diakses 12:52 PM. Tanggal 10 juli 2016

Moore, Frazier. HUMAS: Membangun citra dengan komunikasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2005

Morissa, M.A. Metode Penelitian Survei. Penerbit Kencana :Jakarta 2012

Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Diskriptif Kualitatif. Penerbit Referensi(GP Press Group): Jakarta Selatan, februari 2013.

Natalia, Dian, “Strategi Public Relations dalam Pencitraan Bupati”. e-journal UAJY. 1 januari 2012. <http://e-journal.uajy.ac.id/1210/2/1KOM03535.pdf> di akses 10:00 PM.Tanggal 27 februari 2016

Nukma, Usman, 8 Jalan Masa Depan (Mainstream Baru Pembangunan Makassar), Makassar: Pelita Pustaka,2014

Parsons, Wayne, Public Policy (Pengantar Teori & Praktiik Analisis Kebijakan). Kencana: Jakarta, 2008

Primarni, Amie, Introduction to Public Relations. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia. 2011

Ruslan, Rosady, Kampanye Public Relations. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

1997

Saeful Muhtadi, Asep, Komunikasi Politik Indonesia, Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.2008

Sari, Mala Elta, Press Release dan Citra Pemerintah, (universitas Sumatera utara,

medan 2014, sebuah skripsi).

Siswanto, Bambang, HUMAS (Hubungan Masyarakat teori dan praktek). Jakarta:

bumi aksara. 1992

Subiakto, Henry, Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi. Jakarta: Kencana.

2012.

Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Penerbit

Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2010

Surakhmad, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik,

Bandung: Tarsito, 1990

Suyanto, Bagong dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif

Pendekatan Edisi ketiga, Jakarta: Kharisma Putra Utama 2005

Sy, Pahmi, Politik Pencitraan, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010

Wijaya, A.W. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Palembang: Bumi Aksara.

1991. Hlm.95

Wutun, Monika, Analisis Berita Politik Tentang Gubernur Nusa Tenggara Timur

di Media Massa Cetak, (universitas Padjadjaran, Bandung 2013, sebuah

*skripsi*)